

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD
SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rr. Trapsilo Anggoro Yekti

Nomor Mahasiswa : 01.312.039

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD
SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rr. Trapsilo Anggoro Yekti

Nomor Mahasiswa : 01.312.039

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD
SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)**

SKRIPSI

**disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Rr. Trapsilo Anggoro Yekti
Nomor Mahasiswa : 01.312.039

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 21 Februari 2005

Penyusun,

(Rr. Trapsilo Anggoro Yekti)

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD
SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

**Nama : Rr. Trapsila Anggoro Yekti
Nomor Mahasiswa : 01.312.039
Program Studi : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 21 Februari 2005
Dosen Pembimbing,**



(Drs. Kesit Bambang Prakosa, Msi)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

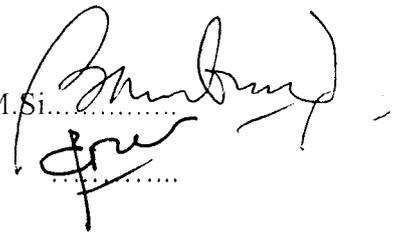
ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI TOLAK UKUR
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)

Disusun Oleh: **RADEN RARA TRAPSILO ANGGORO YEKTI**
Nomor mahasiswa: 01312039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 April 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si.....

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

“ Allah adalah sumber cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti bejana yang tidak tembus, didalamnya ada pelita; pelita yang tertanam dalam kaca; kaca itu ceria bagaikan bintang bersinar, yang menyala karena minyak zaitun yang penuh berkah, tidak karena timur atau karena barat; minyaknya sendiri bercahaya meski tidak tersentuh api. Cahaya berselaput cahaya. Allah memberi petunjuk dengan cahaya-Nya kepada orang yang Ia kehendaki. Demikian Ia membuat perumpamaan bagi segenap manusia. Allah Mahatahu akan segala hal”.

(Q.S. An Nuur : 35)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Al Insyirah : 6 – 8)

“Kita harus bisa menerima ketidakpuasan terbatas. Tetapi kita tidak boleh pernah kehilangan harapan tak terbatas”. (Martin Luther King)

“Kita jangan menyia-nyiakan hidup untuk merencanakan sesuatu. Lebih baik sedikit menyusun rencana dan bertindak lebih banyak”.

(William Ellery Channing)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Mending Papa tercinta, walau engkau telah tiada tapi engkau adalah motivator hidupku dan akan selalu ada dalam hatiku, terimakasih atas perhatian dan motivasi yang telah engkau berikan semasa hidupmu

Mama tercinta, terima kasih untuk semua yang terbaik untukku, cinta dan kasih sayangmu sepanjang hayatku

Kakak-kakakku, Mbak Ufly dan Mas Okky tersayang yang telah banyak memberi semangat dan motivasi kepadaku

Mas Moko tersayang, terimakasih atas perhatiannya yang selalu ada saat aku susah maupun senang dan telah menjadi sumber inspirasi dan semangatku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahimm

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penyusun selama ini. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DIY)”**. Yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademi guna melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Strata I (SI) pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan bimbingan ataupun bantuan baik dari dosen, rekan-rekan maupun para pihak lainnya. Untuk itu tak lupa penyusun ucapkan terimakasih pada semua pihak terutama kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Kepada kedua orang tua penyusun yang selalu mendoa'kan serta memberi dorongan moral dan materiil agar penyusun berhasil dalam menempuh studi sampai dapat terselesaikan.

3. Dekan Fakultas Ekonomi UII, Drs. H. Suwarsono, M.A., beserta seluruh staf akademi maupun non-akademi atas segala bantuan dan bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini, terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Yang kami hormati Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bantuan, arahan dan perhatian kepada penyusun guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang kami hormati Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberi bimbingan selama penyusun menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Yang kami hormati Kepala BAPPEDA Propinsi DIY beserta jajarannya, Kepala BPKD Propinsi DIY beserta jajarannya dan Sekretariat DPRD Propinsi DIY yang telah bersedia memberi ijin penelitian dan memberi keterangan serta data selama penelitian di Pemerintah Daerah Propinsi DIY.
7. Yang tercinta Mas Agus Nugroho Jatmoko, S.E (mas Moko), yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dan bantuan serta perhatian selama penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Endah, Alfi, Desi, Ratna, Eni, Arie, Irma, Riva, Iis, Didik, Edison dan yang lainnya atas segala persahabatan, pertemanan dan hubungan yang kita jalin selama ini, baik dalam kegembiraan, kesenangan, kesedihan serta kebersamaan kita selama ini dan juga kenangan yang indah diantara kita.

9. Kawan-kawan yang penyusun miliki sebagai penyemangat dan memberi kegembiraan serta atas bantuan dan kebersamaan yang menyenangkan.

Semoga Allah SWT berkenaan membalas semua amal ibadah dan semua kebaikan yang telah penyusun terima.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan, dan semoga karya sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua, *Amin*.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Yogyakarta, 21 Februari 2005

Penyusun,

(Rr. Trapsilo Anggoro Yekti)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul Depan Skripsi	ii
Halaman Judul Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Halaman Pengesahan Skripsi	v
Halaman Berita Acara Ujian	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xviii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8

1.5	Manfaat Penelitian	9
1.6	Metode Penelitian.....	9
1.7	Sistematika Pembahasan	13
BAB II Kajian Pustaka.....		15
2.1	Penilaian Kinerja.....	15
2.2	Pengendalian dan Kinerja	15
2.3	Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja	17
2.4	Penentuan Indikator Kinerja	20
2.5	Tolok Ukur Kinerja sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.6	Anggaran sebagai Alat Pengendalian.....	24
2.7	Perbandingan Anggaran <i>Incrementalism</i> , Anggaran <i>Line-Item</i> dan Anggaran Kinerja	25
2.8	Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.....	26
2.8.1	Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.8.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
2.8.3	Pengelolaan Penerimaan Daerah.....	32
2.8.4	Pengelolaan Pengeluaran Daerah	34
2.8.5	Prinsip-prinsip Pengeluaran Daerah.....	36
2.9	Rasio Keuangan pada APBD sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	39
2.10	Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Daerah	40

BABIII Gambaran Umum Obyek Penelitian	42
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan	42
3.1.1 Filosofi Pembangunan Daerah Propinsi DIY.....	42
3.1.2 Visi Pemerintah Daerah	42
3.1.3 Misi Pemerintah Daerah.....	44
3.2 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2001.....	46
3.3 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2002.....	55
3.4 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2003.....	62
 BAB IV Analisis dan Pembahasan	 73
4.1 Analisis Data dan Pembahasan	73
4.1.1 Mengukur Kinerja Keuangan Daerah pada APBD dengan Rasio Keuangan	 74
4.1.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	74
4.1.1.2 Rasio Efektivitas PAD	76
4.1.1.3 Rasio Keserasian	78
4.1.1.4 <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR).....	81
4.1.1.5 Rasio Pertumbuhan	85
 BAB V Penutup.....	 89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	91

Daftar Pustaka	93
Lampiran	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Perkembangan APBD Propinsi DIY T.A. 2001-2003	75
4.2 Target dan Realisasi PAD Propinsi DIY T.A. 2001-2003	76
4.3 Rencana dan Realisasi APBD Propinsi DIY T.A. 2001-2003	79
4.4 Perhitungan DSCR Propinsi DIY T.A. 2001-2003	82
4.5 Rasio Pertumbuhan APBD Propinsi DIY T.A. 2001-2003.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ringkasan dan Kesimpulan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2001	95
2. Ringkasan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2001	96
3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan per sektor T.A. 2001	100
4. Perhitungan Kas T.A. 2001	101
5. Pencocokan antara Sisa Perhitungan dan Sisa Kas T.A. 2001	102
6. Daftar Hutang T.A. 2001	103
7. Ringkasan dan Kesimpulan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2002	104
8. Ringkasan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2002.....	105
9. Perhitungan Kas T.A. 2002	110
10. Pencocokan antara Sisa Perhitungan dan Sisa Kas T.A. 2002	111
11. Daftar Hutang T.A. 2002	112
12. Ringkasan dan Kesimpulan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2003	113
13. Ringkasan Perhitungan APBD Propinsi DIY T.A. 2003.....	114
14. Perhitungan Kas T.A. 2003	116
15. Pencocokan antara Sisa Perhitungan dan Sisa Kas T.A. 2003	117
16. Daftar Hutang T.A. 2003	118

ABSTRAKSI

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan Analisa Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Rasio Keuangan ini mencerminkan tingkat kemandirian, efektivitas, keserasian, DSCR dan pertumbuhan dari suatu Pemerintah Daerah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Propinsi DIY untuk tahun 2001 sampai dengan 2003 ?

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini diperlukan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Penulisan menggunakan data primer yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Propinsi DIY dengan cara melakukan pengamatan langsung guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan wawancara terhadap sampel yaitu dengan pejabat berwenang serta personel yang berkompeten terhadap data yang diperlukan. Untuk keperluan analisis digunakan data sekunder meliputi: data tahunan (*time series*) APBD Propinsi DIY dari tahun anggaran 2001/2002, 2002/2003 dan 2003/2004, data Perhitungan APBD Propinsi DIY per tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003, data Nota Perhitungan APBD tahun anggaran 2001, 2002, dan 2003, dan data Penjabaran Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran 2001, 2002, dan 2003. Pengambilan data diperoleh dari berbagai sumber meliputi: BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Propinsi DIY, BAPPEDA Propinsi DIY dan DPRD Propinsi DIY.

Metode analisa yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu: dengan mengolah dan menghitung data dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan, untuk mengetahui tolok ukur penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan daerah, dan menganalisis hasil perhitungan dan pengolahan data tersebut dengan memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata kegiatan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY telah berjalan cukup efektif dan efisien, sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah, yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting

terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembiayaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian wewenang tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.¹

Lahirnya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut didasari adanya penyerahan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dari Pemerintah Pusat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.²

Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah.

¹ UU Otonomi Daerah 1999, Jakarta : Penerbit Sejahtera Mandiri, 1999, hal. 103.

² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*., Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2002, hal. 131.

Konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut adalah bahwa daerah harus mampu menyediakan kepastian tersedianya dana bagi daerah dan mewujudkannya dalam pemerataan pembangunan daerah secara efisien. Salah satu upaya pemerataan pembangunan dengan pengelolaan keuangan secara sistematis melalui sistem anggaran yang dapat diterima publik melalui rangkaian kerja keuangan yang sistematis dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran akan dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan dan pengendalian anggaran daerah, dapat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD, masyarakat dan pihak-pihak yang bersifat independen.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi kinerja daerah dalam memberdayakan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban adalah kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengelolaan, baik atas kewajiban pinjaman tersebut maupun pengelolaan lainnya.

Pada setiap pengambilan kebijakan perencanaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk menilai keberhasilan dan menganalisa kinerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan dasar analisis rasio keuangan yang telah dicapai selanjutnya dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.³

Penelitian Widodo, sebagaimana ditulis Abdul Halim (2001), menganalisis rasio APBD pada Pemda Boyolali. Rasio yang diidentifikasi Widodo ini antara lain :⁴

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber daya dana ekstern. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah dapat digunakan alat analisa sebagai berikut :

³ Abdul Halim, *Bunga Rampai. Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN, 2004, hal. 282.

⁴ Ibid., hal 284.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektifitas dirumuskan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah}}$$

3. Rasio Aktivitas

a. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan daerah secara optimal. Rasio Belanja Rutin dirumuskan :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio Belanja Pembangunan menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja Pembangunan Daerah secara optimal. Rasio Belanja Pembangunan dirumuskan :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. *DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)*

DSCR digunakan sebagai pembanding antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio DSCR dirumuskan :

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{ Bunga} + \text{ Biaya Pinjaman)}} \geq 2,5$$

5. **Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan keberhasilannya

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio Pertumbuhan dirumuskan :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Dimana :

P_n = data pada tahun ke-n

P_o = data pada tahun ke-o

Dalam menilai kinerja pemerintahan Daerah pendekatan analisis rasio keuangan dapat mengarahkan kinerja APBD ke suatu hasil, sesuai yang diharapkan oleh pemerintah daerah adalah kinerja yang memberikan kontribusi untuk menjadikan pemerintah daerah sebagai institusi penciptaan kekayaan. Berdasarkan penelitian Widodo di Boyolali, penulis mencoba meneliti kembali (mereklikasi) pada APBD Pemerintah Daerah Propinsi DIY, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY).**

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu alat ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Analisa Rasio Keuangan APBD. Rasio Keuangan ini mencerminkan tingkat kemandirian, efektivitas, keserasian, DSCR dan pertumbuhan dari suatu Pemerintah Daerah. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Propinsi DIY untuk tahun 2001 sampai dengan 2003?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini dibatasi pada Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi DIY periode tahun anggaran 2001, 2002, dan 2003.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DIY setelah diterapkannya UU No. 25 Tahun 1999.
2. Menilai kemandirian keuangan daerah pasca diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999.
3. Mengetahui kontribusi dari sumber-sumber pendapatan terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan setelah pelaksanaan otonomi.
4. Mendeteksi sejauhmana perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran dari penulis untuk kebijakan Pemda Propinsi DIY.
2. Penulisan skripsi ini akan dapat menambah khasanah dan pengetahuan serta wawasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Propinsi DIY dan bagaimana menganalisisnya.
3. Penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk bahan bacaan yang nantinya dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan bagi pembaca umum yang memerlukan serta peneliti yang tertarik mengangkat tema yang sama.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan studi kasus untuk melihat bagaimana Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Rasio Keuangan pada APBD.

1.6.1 Jenis data dan sumber data

Jenis data yang diperlukan berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Penulisan menggunakan data primer yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Propinsi DIY dengan cara melakukan pengamatan langsung guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan wawancara terhadap sampel

yaitu dengan pejabat berwenang serta personel yang berkompeten terhadap data yang diperlukan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan mengenai APBD.

Pengambilan sampel terhadap pejabat berwenang serta personel yang berkompeten terhadap data yang diperlukan dilakukan dengan metode *judgement sampling* dengan alasan tidak semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel artinya akan dipilih pejabat atau personel yang berkompeten yang memang mengena pada sasaran wawancara.

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi (lembaga) terkait dan studi pustaka. Untuk keperluan analisis digunakan :

- Data tahunan (*time series*) APBD Propinsi DIY dari tahun anggaran 2001/2002, 2002/2003 dan 2003/2004.
- Data Perhitungan APBD Propinsi DIY per tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003.
- Data Nota Perhitungan APBD tahun anggaran 2001, 2002, dan 2003.
- Data Penjabaran Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran 2001, 2002, dan 2003.

Pengambilan data diperoleh dari berbagai sumber :

- BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Propinsi DIY.
- BAPPEDA Propinsi DIY
- DPRD Propinsi DIY

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada Analisis Rasio Keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Propinsi DIY.

Untuk melengkapi data penulisan penelitian ini, penulis mengambil subyek penelitian pada Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi DIY.

1.6.2 Metode pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan beberapa teknik yaitu:

- Dokumentasi terhadap:
 - Data Perhitungan APBD tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003.
 - Data Nota Perhitungan APBD tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003.
 - Data Penjabaran Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003.
 - Data-data yang berhubungan dengan APBD menyangkut analisis rasio keuangan seperti : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan.

- Studi Kepustakaan

yaitu pengumpulan data berupa peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan biaya, target dan realisasi APBD Propinsi DIY serta literatur-literatur tentang pemerintahan di daerah.

Teknik pertanyaan yang terdiri atas:

- Wawancara

Mengenai apakah realisasi APBD sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, permasalahan apa yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan APBD dan bagaimana upaya penyelesaiannya, serta kebijakan apa yang akan diambil Pemda Propinsi DIY.

1.6.3 Metode analisis

Metode analisa yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengolah dan menghitung data dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan, untuk mengetahui tolok ukur penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan daerah.
2. Menganalisis hasil perhitungan dan pengolahan data dengan memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif.

3. Mengkaitkan hasil penafsiran dengan upaya pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DIY .

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab adalah :

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah ; perumusan masalah ; batasan masalah ; tujuan penelitian ; manfaat penelitian ; metode penelitian ; sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas dasar-dasar teori mengenai definisi penilaian kinerja, pengendalian dan kinerja, tujuan dan manfaat penilaian kinerja, penentuan indikator kinerja, tolok ukur kinerja sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran tradisional; pendekatan *Incrementalism* dan *Line-Item*, anggaran kinerja, konsep dasar pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan penerimaan daerah dan belanja daerah, prinsip-prinsip pengeluaran daerah, rasio keuangan pada APBD, pengawasan dan pengendalian anggaran daerah.

BAB III Tinjauan Obyek Penelitian

adalah tinjauan obyek penelitian, merupakan uraian/gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan organisasi sektor publik yang bersangkutan dan informasi lain yang diperoleh yang mendukung penelitian. Bagian ini menjelaskan sejarah singkat Pemda Propinsi DIY.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Berisi pembahasan atau analisa data yang dilakukan sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Propinsi DIY.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penilaian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja yang terlihat atau kemampuan kerja (Badudu, 1996). Kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut seseorang, sehingga pengukuran kinerja atau menurut Mulyadi (1997) adalah penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara lebih khusus, Mulyadi mendefinisikan penilaian kinerja sebagai penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh manajemen organisasi sendiri (intern) maupun pihak luar (ekstern). Bagi manajemen, penilaian kinerja merupakan alat pengendalian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi kerja bagian (divisi) pada periode lalu. Pihak luar melakukan penilaian kinerja sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif investasi sebagai peramalan kondisi organisasi di masa yang akan datang.

2.2 Pengendalian Dan Kinerja

Sebuah organisasi sudah pasti mempunyai tujuan atau misi, baik dalam bentuk pernyataan atau rumusan, yang menunjukkan kegunaan atau alasan keberadaan organisasi tersebut. Tujuan dapat dicapai melalui berbagai cara atau

ditempuh melalui berbagai jalur. Untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, suatu organisasi mengembangkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan tersebut, suatu organisasi memerlukan sistem pengendalian.

Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian dilakukan terutama pada tahap menengah (operasional), yaitu level pengendalian manajemen (*management control*) dan pengendalian tugas (*task Control*).

Pengendalian adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda, situasi, dan organisasi (Anthony, Dearden, dan Bedford, 1995: 4). Pengendalian merupakan suatu aktifitas manajemen yang berhubungan dengan penentuan tindakan untuk menerapkan keputusan perencanaan dan mengevaluasi kinerja apakah segala sesuatu berjalan atau terlaksana sesuai dengan rencana serta menyediakan umpan balik dari hasil-hasil yang telah dicapai (Fauzi, 1995 : 78). Merchant (1998 : 69) menyebutkan bahwa jika berpikir rencana apa yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi bisnis, pikirlah pertama kali tentang kinerja. Merchant menganggap bahwa kinerja merupakan contoh yang paling baik dari suatu tipe pengendalian, dan kinerja ini disebut sebagai "*result control*" karena melibatkan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), baik dengan individu maupun kelompok. *Reward* dapat berupa kenaikan gaji, bonus dan tunjangan, penempatan kerja dilokasi yang lebih baik,

promosi, otonomi, dan pengakuan diberikan bagi mereka yang dapat menghasilkan *good result* bagi organisasi.

Sebaliknya, *punishment* diberikan bagi mereka yang menghasilkan *poor result* bagi organisasi. Dengan demikian terlihat bahwa ada kaitan atau hubungan yang saling mempengaruhi antara pengendalian dan kinerja.

Unsur kunci dalam sistem pengendalian adalah adanya umpan balik (*feedback*), yaitu perbandingan antara pelaksanaan sebenarnya terhadap pelaksanaan yang direncanakan. Salah satu sarana untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah laporan kinerja.

Selanjutnya perbandingan hasil yang dilaksanakan dengan anggarannya dapat memberikan umpan balik bagi manajemen untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta untuk memberi masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi personalia dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johnny Setyawan, 1999 :237).

Dalam "*Reference Guide*", *Province of Alberta, Canada* disebutkan bahwa Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan

penghargaan /hukuman (*reward/punishment*), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.
2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.
5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

2.4 Penentuan Indikator Kinerja

Mardiasmo (2001) menjelaskan untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi. Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia. Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Kinerja yang dicapai oleh suatu pemerintahan daerah pada dasarnya adalah prestasi para pegawai itu sendiri mulai dari tingkat eksekutif sampai pada pegawai operasional. Sumber daya manusia merupakan asset vital dalam organisasi pemerintahan ini. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah (Pemda) tidak mungkin dapat berhasil jika pelaku para pegawai tidak diarahkan dengan baik. Prestasi para pegawai harus diukur dan dievaluasi. Informasi hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) untuk mengarahkan perilaku pegawai ini menuju perbaikan kinerja selanjutnya. *Feedback* ini memuat informasi objektif mengenai kinerja individual pegawai yang selanjutnya dapat dilaporkan kepada pegawai yang bersangkutan dalam bentuk laporan tertulis atau rapor pegawai.

2.5 Tolok Ukur Kinerja sebagai Alat untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui

evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan rasio keuangan sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DIY. Tolok ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Unit Kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah.

Penetapan Standar Pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh Daerah dan sekaligus merupakan akuntabilitas Daerah. Penetapan Standar Pelayanan untuk Daerah Propinsi mengacu pada indikator-indikator pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berpedoman pada Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Selain Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, setiap Daerah dapat mengembangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan program atau kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja. Pengembangan indikator keberhasilan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran Unit Kerja, Program atau kegiatan.
2. Mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas.
3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.
4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.
5. Andal (*reliable*), diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
2. Keluaran (*Output*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*Outcome*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

4. Manfaat (*Benefit*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari hasil.
5. Dampak (*Impact*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

2.6 Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.

- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians.
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

2.7 Perbandingan Anggaran *Incrementalism*, Anggaran *Line-Item* dengan Anggaran Kinerja

Anggaran Tradisional bersifat *Incrementalism* artinya hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan ini belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil dan dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar.

Struktur anggaran yang bersifat *line-item* didasarkan atas dasar sifat (*nature*) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode *line-item budget* tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang.

Pendekatan Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh

tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output.

Walaupun sistem anggaran kinerja ini jauh lebih baik daripada sistem anggaran tradisional, namun penerapannya masih sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga ahli dalam bidang anggaran dan akuntansinya yang dimiliki oleh berbagai pemerintahan.
- b. Kegiatan dan jasa pemerintah pada umumnya tidak dapat segera diukur dalam pengertian per unit output ataupun biaya per unit.
- c. Klasifikasi rekening pemerintah pada umumnya dibuat berdasarkan klasifikasi anggaran, tidak berdasarkan klasifikasi akuntansi biaya. Hal ini menyebabkan proses pengolahan data menjadi sangat sulit atau bahkan menjadi tidak mungkin (Lyn, 1974).

2.8 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya menurut Yuliati (2004), berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan

agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam konsep yang lebih luas, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

- a. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat Daerah.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal : pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Kedua, Daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan pemerintahan (penghematan anggaran seperti yang dihasilkan oleh standar analisa belanja), redefinisi anggaran harus juga mampu menanyakan apakah suatu layanan publik masih harus diproduksi sendiri oleh Pemerintah Daerah atau cukup disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara kemitraan atau privatisasi.

2.8.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Pinjaman Daerah; dan
 - d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, kemudian pada ayat (2) menyatakan selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah tidak harus mengelola sendiri keuangan daerah tersebut bahkan Kepala Daerah dimungkinkan untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangannya dalam bidang keuangan daerah kepada perangkat pengelola keuangan yang ada di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dikemukakan pendapat Brian Binder (1989) yang

mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah :

- a. Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwil) bertanggungjawab pada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan pembukuan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat daerah yaitu Bagian Keuangan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan, dan juga menyiapkan Repetada yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD.
- c. Dalam lingkungan Sekretariat terdapat Bagian Pembangunan (Bagian Penyusunan Program), yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah, dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut pajak, retribusi daerah dan jenis penerimaan lainnya. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah.
- e. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah, bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang, serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.

- f. Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas dalam hal pemeriksaan keuangan daerah.

2.8.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

2.8.3 Pengelolaan Penerimaan Daerah

Dalam rangka membicarakan kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD yang dibiayai dari dan atas beban APBD, maka yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh suatu daerah. Dengan diketahuinya total penerimaan yang diperkirakan dalam 1 tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana penerimaan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (defisit) yang terjadi. Oleh karena itu, perlu sesegera mungkin mengupayakan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan sehingga pendapatan daerah dapat segera ditingkatkan guna menutupi atau setidaknya dapat memperkecil defisit anggaran yang terjadi. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. **Intensifikasi**, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :
 1. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
 2. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan *continue* (berkelanjutan) untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan asli Daerah oleh aparatur.
 4. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
 5. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.
 6. Mengadakan pendekatan persuasive kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.
 7. Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b. **Ekstensifikasi**, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut :
1. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
 2. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
 3. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

2.8.4 Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja Rutin (Operasional), belanja Pembangunan (belanja Modal) serta pengeluaran tidak tersangka.

a. Belanja Rutin/Operasional (*Recurrent Expenditure*)

Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin terdiri dari :

1. Belanja Administrasi Umum:
 - Belanja Pegawai,
 - Belanja Barang,
 - Belanja Perjalanan Dinas, dan
 - Belanja Pemeliharaan.
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana

b. Belanja Investasi/Pembangunan (*Investment/Capital Expenditure*)

Belanja Investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja Investasi terdiri dari :

1. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja Publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur)

yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah.

2. Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.
3. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria :
 - ◆ Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
 - ◆ Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - ◆ Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

Pengeluaran Transfer ini terdiri atas : angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

c. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan :

1. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.

2. Tagihan Tahun lalu yang belum diselesaikan dan/atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

2.8.5 Prinsip-prinsip Pengeluaran Daerah

Prinsip pengeluaran daerah yang harus dipertimbangkan meliputi: *Value for money*, kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan pengendalian.

Prinsip-prinsip Akuntabilitas pengeluaran daerah :

1. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

Secara sistematis Irene Rubin (1996), mencoba untuk menjelaskan dan menjabarkan konsep akuntabilitas dalam sudut pandang sebagai berikut:

1. Akuntabilitas merupakan tanggapan atau reaksi atas otoritas birokrasi atau otoritas hirarki (*responding to bureaucratic or hierarchical authority*), khususnya yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Untuk dapat mencapai akuntabilitas ini, maka negara bagian memusatkan perhatian pada

penganggaran yang memiliki keseragaman kedalam akuntansi pemerintah daerah dan kedalam anggaran pemerintah daerah. Hanya dengan akuntansi dan penganggaran yang seragam official tingkat negara bagian dapat menguji suatu anggaran daerah untuk melihat apakah pemerintah daerah patuh terhadap undang-undang.

2. Akuntabilitas berarti mengharuskan pelaporan pada publik (*reporting to public*) secara terinci dan komprehensif, sehingga warga dapat mengetahui bagaimana uang mereka dibelanjakan.
3. Akuntabilitas berarti menekankan pada pengaruh pegawai yang dipilih bertanggungjawab terhadap hasil anggaran dan kualitas dari manajemen keuangan (*holding elected official responsible for budget outcome and the quality of financial management*). Tipe akuntabilitas ini berkaitan dengan penganggaran eksekutif (*executive budgeting*), karena letak anggaran di tangan satu orang yaitu kepala kantor eksekutif (*chief executive officer*).
4. Akuntabilitas berarti menekankan pada pengendalian warga negara secara langsung (*direct citizen control*) atau pihak yang mempunyai pengaruh atas formasi anggaran, proses alokasi dan prioritas anggaran.

Wirokartono (2000), menjelaskan untuk mewujudkan akuntabilitas baik keuangan daerah maupun akuntabilitas publik, ada satu metode yang disarankan IMF, yaitu *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* dengan empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. *Clarity of rules an responsibilities*, yaitu tugas dan kewenangan serta tanggungjawab setiap institusi pemerintah harus jelas. Di samping itu, harus

ada pula kerangka hukum dan administratif yang jelas dalam manajemen keuangan dan anggaran. Misalnya harus jelas secara hukum mengenai jenis-jenis penerimaan negara dan cara-cara mengadministrasikan penerimaan tersebut.

2. *Public availability of information*, yaitu masyarakat luas harus mendapatkan informasi secara lengkap mengenai keseluruhan hal yang terkait dengan keuangan dan anggaran pemerintah, baik di masa lalu, sekarang dan akan datang. Dalam hal ini termasuk mengenai jumlah laporan dan penjelasan dari laporan tersebut.
3. *Open budget preparation, execution and reporting*, yaitu bahwa setiap langkah; persiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran, perlu disampaikan secara terbuka, seperti misalkan arah kebijakan fiskal, posisinya dalam kerangka makroekonomi, estimasi-estimasi penerimaan dan pengeluaran.
4. *Independent assurance of integrity*, yaitu perlu adanya lembaga independen untuk menilai kinerja anggaran pemerintah, misalkan perlu badan audit nasional yang independen untuk memeriksa operasi keuangan pemerintah.

Kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik (Mardiasmo dan Kirana Jaya, 1999).

Mardiasmo (2000) menjelaskan, perubahan sistem anggaran daerah yang dikehendaki yaitu:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM.

2.9 Rasio Keuangan pada APBD sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil

masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan satu periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Halim (2002 : 127)

2.10 Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Daerah

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya APBD mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah dan sejalan dengan kerangka kebijaksanaan nasional atas dasar prinsip negara kesatuan.

Dalam proses atau siklus anggaran daerah dikenal 4 (empat) tahap proses anggaran daerah yang terdiri dari: perencanaan dan persiapan (*planning and preparation*), persetujuan/ratifikasi (*approval/ratification*), implementasi (*implementation*) dan pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada dasarnya tahap pelaporan dan evaluasi hanyalah merupakan merupakan salah satu bentuk dari pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran daerah, yang

hasilnya dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) dalam perencanaan anggaran berikutnya. Pengendalian merupakan proses yang berlangsung terus menerus dalam keseluruhan siklus APBD. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan yang terjadi sejak dini telah diketahui dan dapat dengan mudah dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Kemampuan organisasi dalam merancang sistem pengendalian yang efektif akan sangat tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam mengenali situasi dan kondisi objek yang akan dikendalikan.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*sosial control*). Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah (misalnya inspektorat).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Sejarah singkat dan perkembangan

3.1.1 Filosofi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *ayom, ayem tata, titi, tentrem karta raharja*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

3.1.2 Visi Pemerintah Daerah

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi diatas, maka visi pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumber daya berkelanjutan.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkan visi tersebut, antara lain :

- a. Terbentuk citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat secara adil dan merata.
- c. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.
- d. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya.

- e. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan.
- f. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka otonomi daerah.

3.1.3 Misi Pemerintah Daerah

Berdasarkan visi pemerintah daerah serta kondisi daerah yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut diatas, maka ditetapkan misi pemerintah daerah, sebagai berikut :

- a. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi.
- b. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah.
- c. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar Wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung perlibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumber daya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE (*Meeting Incentive, Conference and Exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa.
- f. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan Industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.
- g. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.

3.2 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Dalam penyusunan anggaran tahun 2001 berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001, serta dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi setiap Instansi pengelola anggaran.

APBD 2001 yang ditetapkan dengan Perda No.3 Tahun 2001, dari sisi Pendapatan memuat perangkaan sebesar Rp.257,50 milyar, sedangkan pada sisi Belanja sebesar Rp.356,75 milyar sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.99,25 milyar. Defisit tersebut merupakan anggaran yang disusun berdasarkan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memperhatikan adanya Penerimaan Dana Kontingensi sebesar Rp.111,55 milyar.

Setelah APBD Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan selama 9 bulan, maka dilakukan perubahan APBD menjadi berimbang antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp.416,91 milyar. Sedangkan, Urusan Kas dan Perhitungan antara Penerimaan dan Pengeluaran setelah perubahan berimbang pada posisi Rp.25,84 milyar. Perubahan anggaran dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum masuk dalam anggaran sebelum perubahan dan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan penataan kelembagaan sesuai Perda No.7 Tahun 2001 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD 2000.

A. PENDAPATAN

Jumlah Anggaran Pendapatan tidak termasuk Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) ditargetkan sebesar Rp.416,91 milyar, realisasinya Rp. 433,82 milyar, atau mencapai 104,06%, sehingga lebih dari target sebesar Rp.16,91 milyar. Sedangkan Penerimaan UKP direncanakan 25,84 milyar, realisasinya sebesar Rp.22,94 milyar, atau hanya mencapai 88,80%, sehingga kurang sebesar Rp.2,89 milyar.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan, yang secara keseluruhan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. PAD dalam Tahun Anggaran 2001 ini target ditetapkan sebesar Rp.129,41 milyar, realisasinya Rp.142,28 milyar atau mencapai 109,94%, sehingga melebihi dari target sebesar Rp.12,86 milyar, dengan rincian per Pos Penerimaan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pos Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan target sebesar Rp.116,30 milyar, realisasinya Rp.123,51 milyar, atau mencapai 106,20%, sehingga lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7,21 milyar.

b. Retribusi Daerah

Pos Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menampung ayat-ayat penerimaan yang dikelola oleh instansi, diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bersangkutan, antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
5. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
6. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan

Secara keseluruhan ditargetkan Rp.3,34 milyar, realisasinya mencapai Rp.3,96 milyar, atau mencapai 118,63%, sehingga melebihi target Rp.622,70 juta.

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Pos Bagian Laba Usaha Daerah, menampung berbagai usaha daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Bank Pembangunan Daerah
2. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA"
3. Perusahaan Daerah TARUMARTANI
4. Badan Usaha Kredit Pedesaan
5. Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga

Dalam Tahun Anggaran 2001 ini ditargetkan Rp.4,75 milyar, realisasinya hanya mencapai Rp.4,38 milyar, atau sebesar 92,31%, sehingga di bawah target Rp.365,38 juta.

d. Lain-lain Pendapatan

Pos Pendapatan Lain-lain ini dimaksudkan untuk menampung Penerimaan-penerimaan di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Usaha Daerah, yang dalam Tahun Anggaran 2001 ini antara lain terdiri dari :

1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
2. Jasa Giro
3. Sumbangan Pihak Ketiga
4. Sumber Lain-lain Pendapatan Yang Syah.

Secara keseluruhan ditetapkan Rp.5,02 milyar, realisasinya mencapai Rp.10,41 milyar, atau sebesar 207,44%, sehingga lebih dari yang ditetapkan sebesar Rp.5,39 milyar.

2. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI / DANA PERIMBANGAN

Bagian Pendapatan ini terdiri dari Pos Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Rutin Daerah, yang secara keseluruhan direncanakan Rp.239,98 milyar, realisasinya mencapai Rp.244,03 milyar, atau mencapai 101,69%, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.4,04 milyar, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak

Pos Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2001 ini terdiri dari :

1. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Secara keseluruhan ditetapkan Rp.14,55 milyar, realisasinya sebesar Rp.21,09 milyar, atau mencapai 144,95%, sehingga lebih sebesar Rp.6,53 milyar.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ini terdiri dari Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Pemberian Hak atas Tanah Negara, direncanakan Rp.3,51 milyar, realisasinya Rp.1,15 milyar, atau hanya mencapai 32,72%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.2,36 milyar.

c. Dana Alokasi Umum

Pos Dana Alokasi Umum terdiri dari Pendapatan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Rutin Non Pegawai, direncanakan Rp.110,36 milyar, realisasinya Rp.110,23 milyar atau sebesar 99,89%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.125,20 juta.

d. Dana Darurat

Pada Pos ini direncanakan Rp.111,55 milyar, realisasinya mencapai Rp.111,55 milyar atau sebesar 100%.

3. PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Tahun Anggaran 2001 ini, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merencanakan transaksi Pinjaman baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Lembaga Keuangan Dalam maupun Luar Negeri.

4. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

Pos Urusan Kas dan Perhitungan adalah merupakan Pos Transitoris dan segera akan dikeluarkan lagi melalui Pos Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan.

Pos UKP ini terdiri dari :

- a. Iuran Wajib Pegawai
- b. Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai dan
- c. Pajak Penghasilan

Ditetapkan dalam APBD sebesar Rp.25,84 milyar, realisasinya Rp.22,94 milyar, atau sebesar 88,80%, sehingga kurang dari yang ditetapkan sebesar Rp.2,89 milyar.

2. BELANJA

a. BELANJA RUTIN

Anggaran Belanja Rutin diperuntukan membiayai Belanja Pegawai, Belanja Rutin Non Pegawai, Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Kabupaten/Kota, Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga, Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain serta Pengeluaran Tidak Tersangka. Belanja

Rutin tidak termasuk Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) ditetapkan Rp.356,32 milyar, realisasinya Rp.274,97 milyar, atau sebesar 77,17%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.81,34 milyar, yang secara rinci per belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2001 ini direncanakan Rp.184,25 milyar, antara lain untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Lainnya, Honorarium dan Tunjangan Kesehatan, realisasinya Rp.161,38 milyar atau 87,58%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.22,87 milyar.

b. Belanja Barang

Dalam kelompok Belanja Barang ini mencakup antara lain Ongkos Kantor, Pembelian Inventaris Kantor dan Lain-lain, direncanakan Rp.25,21 milyar, realisasinya Rp.22,35 milyar, atau mencapai 88,64%, sehingga kurang dari anggaran Rp.2,86 milyar.

c. Belanja Pemeliharaan

Untuk keperluan Belanja Pemeliharaan dalam Tahun Anggaran 2001 direncanakan Rp.4,29 milyar, dimaksudkan antara lain untuk kebutuhan pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas, realisasinya Rp.3,90 milyar, atau sebesar 90,82%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.394,16 juta.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sehubungan dengan pelaksanaan tugas, dalam tahun anggaran 2001 direncanakan Rp.2,31 milyar, realisasinya Rp.1,92 milyar, atau mencapai 83,07%, atau kurang Rp.392,18 juta.

e. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga

Untuk keperluan membayar angsuran pinjaman hutang dan bunga pada tahun anggaran 2001 ditetapkan dalam anggaran Rp.218,77 juta, realisasi telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran.

f. Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan

Belanja ini dialokasikan untuk Subsidi dan Sumbangan kepada Kabupaten Kota se-Propinsi DIY, rencana yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.35,73 milyar, realisasinya sebesar Rp.35.70 milyar, atau mencapai 99,93%, sehingga kurang Rp.23,31 juta dari yang telah ditetapkan.

g. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain

Belanja ini direncanakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang bersifat bantuan antara lain diberikan kepada :

1. Instansi Vertikal
2. Yayasan
3. Organisasi Profesi

Ditetapkan sebesar Rp.87,58 milyar, realisasinya Rp.48,98 milyar, atau mencapai 55,93%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.38,60 milyar.

h. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran ini dimaksudkan untuk menampung kegiatan yang tidak dapat masuk dalam pasal-pasal pengeluaran sebelumnya maupun semua biaya yang menjadi beban APBD dan harus dikeluarkan namun sulit untuk diprediksi sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2001 ini Pengeluaran Tidak Tersangka ditetapkan sebesar Rp.16,69 milyar, realisasinya Rp.507,43 juta, atau sebesar 3,04%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp.16,19 milyar.

b. BELANJA PEMBANGUNAN

Anggaran Belanja Pembangunan dalam tahun anggaran 2001 dengan dana sebesar Rp.60,58 milyar, dan berasal dari Dana Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.48,63 milyar, Dana Perimbangan Rp.11,07 milyar dan Dana Konversi Tanaman Cengkeh sebesar Rp.880,95 juta, yang tersebar dalam 82 proyek pembangunan.

Secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp.54,31 milyar, atau mencapai 89,64%, sehingga kurang dari anggaran Rp.6,27 milyar.

Anggaran Belanja Pembangunan tersebar atau dialokasikan pada sektor-sektor sebagai berikut :

a. Sektor Pertanian dan Kehutanan.

- b. Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi.
- c. Sektor Transportasi.
- d. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.
- e. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- f. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga.
- g. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.
- h. Sektor Perumahan dan Pemukiman.
- i. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

3. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)

Pengeluaran UKP ini dimaksudkan untuk menampung pengeluaran pengeluaran yang bersifat transitoris, dan berhadapan langsung dengan Pos Penerimaan Urusan Kas dan Perhitungan, direncanakan Rp.25,84 milyar, realisasinya Rp.22,89 milyar, atau mencapai 88,58%, atau kurang dari rencana Rp.2,95 milyar.

3.3 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Tahun anggaran 2002 bagi Propinsi DIY merupakan tahun transisi menuju anggaran berbasis kinerja, berbagai persiapan telah dilakukan dan diharapkan

pada Tahun anggaran 2004 nanti Pemerintah Daerah Propinsi DIY telah menggunakan format anggaran yang berbasis kinerja.

A. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2002 ini jumlah Anggaran Pendapatan tidak termasuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp.469,59 milyar, realisasinya sebesar Rp.551,90 milyar atau 117,53% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp.82,30 milyar.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, secara keseluruhan dapat mencapai rencana yang ditetapkan, yaitu dari rencana sebesar Rp.169,48 milyar, realisasinya sebesar Rp.200,80 milyar atau 118,48% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.31,31 milyar.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, direncanakan sebesar Rp.151,40 milyar, realisasinya sebesar Rp.175,51 milyar atau 115,93% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.24,11 milyar.

b. Retribusi Daerah

Pos Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menampung ayat-ayat penerimaan yang dikelola oleh instansi, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan
5. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Secara keseluruhan pendapatan dari Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.4,04 milyar, realisasinya sebesar Rp.5,09 milyar atau 125,80% sehingga lebih dari yang direncanakan sebesar Rp.1,04 milyar.

c. Laba Perusahaan Milik Daerah

Pemerintah Daerah Propinsi DIY mempunyai beberapa Perusahaan Daerah yaitu :

1. Bank Pembangunan Daerah
2. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA
3. Perusahaan Daerah TARUMARTANI
4. Badan Usaha Kredit Pedesaan
5. Penyertaan Modal atau kerjasama dengan Pihak Ketiga

Secara keseluruhan pendapatan dari Laba Perusahaan Milik Daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga direncanakan sebesar Rp.7,57 milyar, realisasinya sebesar Rp.6,79 milyar atau 89,71% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.779,71 juta.

d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pos ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah di luar Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagian Laba Usaha Daerah.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah antara lain terdiri dari :

1. Jasa Giro
2. Sumbangan Pihak Ketiga
3. Angsuran Rumah Dinas
4. Pendapatan Lain-lain

Secara keseluruhan Pendapatan Lain-lain Yang Sah direncanakan sebesar Rp.6,46 milyar, realisasinya sebesar Rp.13,39 milyar atau 207,32% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.6,93 milyar.

2. DANA PERIMBANGAN

Bagian dana Perimbangan merupakan Penerimaan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak
2. Bagi Hasil Bukan Pajak
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
5. Dana Darurat

Secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.234,63 milyar, realisasinya sebesar Rp.240,92 milyar atau 102,68% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.6,29 milyar.

3. PINJAMAN DAERAH

Dalam Tahun Anggaran 2002 ini tidak ada realisasi dari Pinjaman Daerah, baik Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Bank maupun Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, karena tidak direncanakan adanya pinjaman.

4. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH

Pada Tahun Anggaran 2002 direncanakan Penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penyeimbang sebesar Rp.7,44 milyar, realisasinya berupa Dana Penyeimbang dan Pengembalian Gaji dari KPKN secara keseluruhan sebesar Rp.8,04 milyar atau 108,11% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.603,61 juta.

5. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

Pos Urusan Kas dan Perhitungan adalah menampung semua penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, tetapi merupakan Pos Transitoris yang segera dikeluarkan lagi melalui Pos Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan, antara lain terdiri dari :

- a. Iuran Wajib Pegawai
- b. Pajak Penghasilan dan
- c. Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai

Direncanakan sebesar Rp.29,76 milyar, realisasinya sebesar Rp.21,63 milyar atau 72,70% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.8,12 milyar.

B. BELANJA

1. BELANJA RUTIN

Anggaran Belanja Rutin dimaksudkan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Rutin Non Pegawai yang terdiri dari :

- a. Belanja Barang
- b. Belanja Pemeliharaan
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Angsuran Pinjaman
- e. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- f. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain
- g. Pengeluaran Tidak Tersangka.

Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai direncanakan Rp. 248,78 milyar, realisasinya sebesar Rp.203,52 milyar atau 81,81% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp 45,25 milyar, dan untuk Belanja Rutin Non Pegawai direncanakan Rp.127,77 milyar, realisasinya sebesar Rp.113,74 milyar atau 89,02% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.14,02 milyar.

Sedangkan untuk Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksudkan untuk menampung semua pengeluaran yang bukan merupakan belanja daerah dan bersifat transitoris yang berhubungan dengan Pos Penerimaan Urusan Kas dan Perhitungan, direncanakan sebesar Rp.29,76 milyar, realisasinya Rp.21,41 milyar atau 71,93% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.8,35 milyar.

2. BELANJA PEMBANGUNAN

- a. Anggaran Belanja Pembangunan dialokasikan dan tersebar pada 20 sektor pembangunan yaitu :
 - a. Sektor Industri
 - b. Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - c. Sektor Pengairan
 - d. Sektor Tenaga kerja
 - e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi
 - f. Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika
 - g. Sektor Pertambangan dan Energi
 - h. Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
 - i. Sektor Pembangunan Daerah
 - j. Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
 - k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga
 - l. Sektor Kependudukan dan Keluarga
 - m. Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan
 - n. Sektor Perumahan dan Pemukiman
 - o. Sektor Agama
 - p. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - q. Sektor Hukum
 - r. Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan

- s. Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi
- t. Sektor Pertahanan dan Keamanan.

Anggaran Belanja Pembangunan secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.93,04 milyar, realisasinya sebesar Rp.80,99 milyar atau 87,05% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.12,04 milyar.

3.4 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, masih menganut prinsip anggaran berimbang, sehingga secara riil tidak diketahui seberapa besar tingkat defisit anggaran pada tahun yang bersangkutan, namun akan dapat diketahui besarnya defisit melalui jumlah anggaran cadangan yang dibelanjakan. Dalam perjalanan tahun anggaran 2003, terdapat perubahan kegiatan-kegiatan yang disebabkan karena perubahan kondisi dan situasi, sehingga untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dialokasikan dalam anggaran murni, diperlukan pula Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 yang memuat perangkaan dari sisi pendapatan semula sebesar Rp 497.215.369.022,18 menjadi Rp 656.351.321.796,69 sama dengan sisi belanja.

A. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2003 ini jumlah Anggaran Pendapatan tidak termasuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp.656,35 milyar, realisasinya

sebesar Rp.683,93 milyar atau 104,20%, sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp.27,58 milyar.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan dapat dicapai melebihi rencana yang ditetapkan, yaitu dari rencana sebesar Rp.248,50 milyar, realisasinya sebesar Rp.263,26 milyar atau 105,94%, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.14,76 milyar.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, direncanakan sebesar Rp.217,12 milyar, realisasinya sebesar Rp.228,14 milyar atau 105,08%, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.11,02 milyar.

b. Retribusi Daerah

Pos Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menampung ayat-ayat penerimaan yang dikelola oleh instansi, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Daerah. Secara keseluruhan Pendapatan dan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.7,77 milyar, realisasinya sebesar Rp.8,08 milyar

atau 104,03% sehingga lebih dari yang direncanakan sebesar Rp.313,11 juta.

c. Laba Usaha Daerah

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa Perusahaan Daerah dan Kerjasama dengan Pihak III yaitu : Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, Perusahaan Daerah TARUMARTANI dan Badan Usaha Kredit Pedesaan serta Penyertaan Modal atau Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Secara keseluruhan pendapatan dari Laba Perusahaan Milik Daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga direncanakan sebesar Rp.10,74 milyar, realisasinya sebesar Rp 7,22 milyar atau 99,97%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.3,52 juta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pos ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagian Laba Usaha Daerah. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah antara lain terdiri dari : Jasa Giro, Sumbangan Pihak Ketiga, Angsuran Rumah Dinas dan Pendapatan Lain-lain.

Secara keseluruhan Pendapatan Lain-lain Yang Sah direncanakan sebesar Rp.12,85 milyar, realisasinya sebesar Rp.16,28 milyar atau 126,72% sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.3,43 milyar.

2. DANA PERIMBANGAN

Bagian Dana Perimbangan merupakan Penerimaan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Secara keseluruhan Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.227,13 milyar, realisasinya sebesar Rp.238,62 milyar atau 105,06%, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.11,48 milyar.

3. PINJAMAN DAERAH

Dalam Tahun Anggaran 2003 tidak ada realisasi dari Pinjaman Daerah, baik Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Bank maupun Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, hal ini sesuai dengan anggaran yang tidak direncanakan.

4. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH

Pada Tahun Anggaran 2003 direncanakan Penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penyeimbang sebesar Rp.27,08 milyar, realisasinya sebesar Rp.28,18 milyar atau 104,08%, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp.1,10 milyar.

5. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

Pos Urusan Kas dan Perhitungan adalah menampung semua Penerimaan yang bukan merupakan Pendapatan Daerah, merupakan Pos Transitoris yang akan dikeluarkan lagi melalui Pos Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan, antara lain terdiri dari : Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan dan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai.

Penerimaan Urusan Kas dan Perhitungan direncanakan sebesar Rp.27,49 milyar, realisasinya sebesar Rp.24,23 milyar atau 88,13%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp 3,26 milyar.

B. BELANJA

1. BELANJA RUTIN

Anggaran Belanja Rutin dimaksudkan untuk membiayai Belanja Rutin Pegawai dan Belanja Rutin Non Pegawai :

a. Belanja Pegawai

Anggaran untuk Belanja Pegawai direncanakan Rp.276,76 milyar, realisasinya sebesar Rp.243,57 milyar atau 88,01%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.33,19 milyar.

b. Belanja Rutin Non Pegawai

Belanja Rutin Non Pegawai direncanakan sebesar Rp.303,21 milyar, realisasinya sebesar Rp.267,25 milyar atau 88,14%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.35,96 milyar.

Belanja Rutin Non Pegawai terdiri dari :

1. **Belanja Barang** direncanakan sebesar Rp.51,84 milyar, realisasinya sebesar Rp.47,25 milyar atau 91,14%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.4,59 milyar.
2. **Belanja Pemeliharaan** direncanakan sebesar Rp.22,93 milyar, realisasinya sebesar Rp.22,04 milyar atau 96,13%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.888,37 juta.

3. **Belanja Perjalanan Dinas** direncanakan sebesar Rp.9,45 milyar, realisasinya sebesar Rp.8,89 milyar atau 94,08%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.559,91 juta.
4. **Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga** realisasinya sebesar rencana yaitu Rp. 200,52 juta.
5. **Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan** direncanakan sebesar Rp.87,80 milyar, realisasinya sebesar Rp.76,40 milyar atau 87,02%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.11,39 milyar.
6. **Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain** direncanakan sebesar Rp.25,26 milyar, realisasinya sebesar Rp.24,48 milyar atau 96,93%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.775,443 juta.
7. **Pengeluaran Tidak Tersangka** direncanakan sebesar Rp.105,70 milyar, realisasinya sebesar Rp.87,95 milyar atau 83,21%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp. 17,74 milyar.

c. Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan

Pengeluaran ini dimaksudkan untuk menampung semua pengeluaran yang bukan merupakan belanja daerah dan bersifat transitoris yang berhubungan dengan Pos Penerimaan Urusan Kas dan Perhitungan, direncanakan sebesar Rp.27,49 milyar, realisasinya Rp.24,24 milyar atau 88,17% sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.3,25 milyar.

2. BELANJA PEMBANGUNAN

Anggaran Belanja Pembangunan dialokasikan pada 20 sektor pembangunan yaitu :

- a. Sektor Industri
- b. Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- c. Sektor Pengairan
- d. Sektor Tenaga Kerja
- e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi
- f. Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika
- g. Sektor Pertambangan dan Energi
- h. Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
- i. Sektor Pembangunan Daerah
- j. Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga
- l. Sektor Kependudukan dan Keluarga
- m. Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan
- n. Sektor Perumahan dan Pemukiman
- o. Sektor Agama
- p. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- q. Sektor Hukum
- r. Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan

s. Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi

t. Sektor Pertahanan dan Keamanan.

Anggaran Belanja Pembangunan secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.76,36 milyar, realisasinya sebesar Rp.69,42 milyar atau 90,91%, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp.6,94 milyar.

Realisasi Pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 secara keseluruhan tertuang dalam Perhitungan APBD Tahun 2001, 2002 dan 2003 berdasar tolok ukur penilaian yang dipakai adalah pencapaian indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat setiap proyek seperti yang tercantum dalam indikator kinerja Proyek-proyek APBD 2001, 2002 dan 2003.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 telah dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pengawas Fungsional : Pemeriksaan oleh BPK dengan hasil pemeriksaan 7 temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 7 temuan, Pemeriksaan oleh ITJEN Departemen Dalam Negeri dengan hasil pemeriksaan berupa 116 temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 116 temuan dan Pemeriksaan oleh BAWASDA Propinsi DIY dengan hasil pemeriksaan 196 temuan dan telah ditindaklanjuti 196 temuan.

Sedangkan aspek-aspek yang menjadi penyebab temuan adalah adanya kelemahan pengawasan melekat yang meliputi :

1. Kelemahan dalam unsur pembinaan personil.

2. Kelemahan dalam unsur prosedur.
3. Kelemahan dalam unsur perencanaan.
4. Kelemahan dalam unsur internal review.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif dalam rangka menilai kinerja, dan hal ini telah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2002. Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta aspek metode kerja. Disamping itu, setiap awal tahun pada bulan pertama dilakukan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran sebelumnya yang dimaksudkan untuk menilai kinerja bagi masing-masing instansi. Sedangkan Langkah-langkah strategis yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang, adalah dengan menerapkan sanksi ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, ditetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan fungsional lebih menekankan pada aspek pembinaan, sehingga di dalam memberikan rekomendasi tahap awal penyelesaian lebih menekankan pada pengamanan aset kekayaan daerah. Selanjutnya apabila ternyata pada kesempatan lain yang bersangkutan masih melakukan hal yang sama, diterapkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 ini yaitu Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan

belanja untuk kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga tingkat ketergantungan sumber dana pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan tetap masih besar. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemda Propinsi DIY dari tahun ke tahun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain yaitu: intensifikasi sumber pendapatan yang telah ada, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru. Upaya yang dimaksud antara lain melalui peningkatan pelayanan guna mendorong wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan upaya peningkatan laba BUMD, namun terdapat keterbatasan sumber daya alam.

Sedangkan, upaya yang telah direncanakan oleh Pemda Propinsi DIY adalah peningkatan Pendapatan Usaha Daerah (PUS), yang dilakukan dengan pemberdayaan Aset Daerah, berupa kas, barang milik daerah dan kekayaan lain yang dapat dimanfaatkan dan dimungkinkan akan memberikan kontribusi kepada daerah. Namun, hal ini masih memerlukan dukungan dan persetujuan dari DPRD. Selain itu, juga diperlukan adanya pencermatan dan pengkajian yang lebih mendalam sehingga secara finansial dan politis akan memberikan keuntungan bagi daerah. Keuntungan finansial dapat diperoleh dari pemberdayaan Aset Daerah dengan cara peningkatan manajemen secara profesional maupun kerjasama dengan Investor melalui proses yang kompetitif untuk mendapatkan harga pasar yang tertinggi dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan disini bukan berarti keuntungan bagi Investor dan Pemerintah Daerah saja, namun juga keuntungan bagi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Keuntungan Politis artinya bahwa dengan adanya kerjasama dengan Investor akan mengangkat citra Pemerintah Daerah sebagai institusi yang akuntabel dan dapat dipercaya, sehingga investor tidak ragu lagi untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan memberikan makna yang lebih besar bagi otonomi daerah.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi mengenai analisa data dari APBD Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dengan menghitung rasio keuangannya sebagai tolok ukur penilaian kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas atau sering disebut dengan Rasio Keserasian yang terdiri dari Rasio Belanja Rutin terhadap APBD dan Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) serta Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*).

Dalam menghitung rasio keuangan tersebut diperlukan data-data yang terdapat pada APBD, Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD dan Penjabaran Realisasi Pendapatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003.

4.1. Analisis Data dan Pembahasan

Bagian ini membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan Rasio Keuangan seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian ; Rasio Belanja Rutin terhadap APBD dan Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) serta Rasio Pertumbuhan.

4.1.1 Mengukur Kinerja Keuangan Daerah pada APBD Dengan Rasio Keuangan

4.1.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat) semakin rendah, dengan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH		
2001 = 58,32%	2002 = 76,37%	2003 = 105,95%

Rasio Kemandirian tahun 2001 : $\frac{129.415.456}{221.914.929} \times 100\% = 58,32\%$

Artinya; besar PAD 58,32% dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Rasio Kemandirian tahun 2002 : $\frac{169.489.773}{221.920.000} \times 100\% = 76,37\%$

Artinya; besar PAD 76,37% dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2003} : \frac{248.501.101}{234.543.964} \times 100\% = \mathbf{105,95\%}$$

Artinya: besar PAD 105,95% dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Tabel 4.1
Perkembangan APBD Propinsi DIY
Tahun Anggaran 2001 – 2003
(ribuan rupiah)

No	PENDAPATAN	2001	2002	2003
1	Sisa Perhit. Tahun lalu	47.510.550	58.035.028	153.635.404
2	Pend. Asli Daerah	129.415.456	169.489.773	248.501.101
3	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	18.069.268	20.154.099	19.670.853
4	Bantuan (DAU/DAK/Dana Darurat)	221.914.929	214.480.000	207.460.000
5	Pinjaman + Dana Kontinjensi + Dana Penyeimbang	0	7.440.000	27.083.964
	Jumlah	416.910.203	469.598.899	656.351.322
	BELANJA			
1	Belanja Rutin (termasuk untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga)	356.320.914	376.557.924	579.983.530
2	Belanja Pembangunan (bersumber dr PAD & Non PAD)	60.589.289	93.040.975	76.367.792
	Jumlah	416.910.203	469.598.899	656.351.322

Sumber Data : APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2001 - 2003

Dari perhitungan berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY dari tahun 2001 ke tahun 2003 mengalami peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DIY memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Selain itu juga menandakan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

4.1.1.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi PAD Propinsi DIY
Tahun Anggaran 2001 - 2003
(ribuan rupiah)

No	Keterangan	T. A. 2001		T. A. 2002		T. A. 2003	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Pajak Daerah	116.300.032	123.516.267	151.400.413	175.519.260	217.122.569	228.143.585
2	Retribusi Daerah	3.341.769	3.964.475	4.049.953	5.094.751	7.776.678	8.089.795
3	Laba Usaha Daerah	4.751.217	4.385.831	7.577.808	6.798.089	10.746.394	10.742.872
4	Lain-lain PAD yang sah	5.022.437	10.418.319	6.461.598	13.396.156	12.855.460	16.289.997
	Jumlah	129.415.456	142.284.892	169.489.773	200.808.257	248.501.101	263.266.249
	Rasio Efektivitas	109,94%		118,47%		105,94%	

Sumber Data : Perhitungan APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2001 – 2003

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dihasilkan Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut :

RASIO EFEKTIVITAS PAD		
2001 = 109,94%	2002 = 118,47%	2003 = 105,94%

$$\text{Rasio Efektivitas 2001 : } \frac{142.284.892}{129.415.456} \times 100\% = \mathbf{109,94\%}$$

Artinya; besarnya realisasi PAD 109,94% dari target PAD yang berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas 2002 : } \frac{200.808.257}{169.489.773} \times 100\% = \mathbf{118,47\%}$$

Artinya; besarnya realisasi PAD 118,47% dari target PAD yang berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas 2003 : } \frac{263.266.249}{248.501.101} \times 100\% = \mathbf{105,94\%}$$

Artinya; besarnya realisasi PAD 105,94% dari target PAD yang berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah semula pada tahun 2002 mengalami peningkatan yang drastis menjadi 118,47% , tetapi pada tahun 2003 mengalami penurunan yang tajam yaitu menjadi 105,94%. Namun demikian, tidaklah menjadi masalah karena kemampuan daerah dalam

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Karena Rasio Efektivitas PAD Propinsi DIY lebih dari 100% maka dapat dikatakan Propinsi DIY memiliki kemampuan daerah yang baik.

4.1.1.3 Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Namun demikian, belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Akan tetapi, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi APBD Propinsi DIY
Tahun Anggaran 2001 – 2003
(ribuan rupiah)

No	Keterangan	2001		2002		2003	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Pendapatan Dacrah	416.910.203	433.827.275	469.598.899	551.905.997	656.351.322	683.937.231
2	UKP	25.842.022	22.947.361	29.763.945	21.637.233	27.498.626	24.233.346
3	Jumlah	442.752.225	456.774.636	499.362.844	573.543.230	683.849.948	708.170.576
4	Belanja Rutin	356.320.914	274.975.336	376.557.925	317.275.739	579.983.530	510.827.268
5	Belanja Pembngn.	60.589.289	54.310.863	93.040.975	80.994.853	76.367.792	69.426.430
6	UKP	25.842.022	22.890.346	29.763.945	21.410.594	27.498.626	24.248.270
7	Jumlah	442.752.225	352.176.545	499.362.844	419.681.186	683.849.948	604.501.968
8	Saldo APBD	104.598.091		153.862.044		103.668.609	

Sumber Data : Perhitungan APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2001 – 2003

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, hasil perhitungan Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan adalah sebagai berikut :

RASIO KESERASIAN

No.	Keterangan	2001	2002	2003
1	Rasio Belanja Rutin	263%	206%	493%
2	Rasio Belanja Pembangunan	52%	53%	67%

Rasio Belanja Rutin :

$$\text{Tahun 2001} = \frac{274.975.336}{104.598.091} \times 100\% = \mathbf{263\%}$$

Artinya; besar total belanja rutin 263 % dari total APBD.

$$\text{Tahun 2002} = \frac{317.275.739}{153.862.044} \times 100\% = \mathbf{206\%}$$

Artinya; besar total belanja rutin 206% dari total APBD.

$$\text{Tahun 2003} = \frac{510.827.268}{103.668.609} \times 100\% = \mathbf{493\%}$$

Artinya: besar total belanja rutin 493% dari total APBD.

Rasio Belanja Pembangunan :

$$\text{Tahun 2001} = \frac{54.310.863}{104.598.091} \times 100\% = \mathbf{52\%}$$

Artinya: besar total belanja pembangunan 52% dari total APBD.

$$\text{Tahun 2002} = \frac{80.994.853}{153.862.044} \times 100\% = \mathbf{53\%}$$

Artinya: besar total belanja pembangunan 53% dari total APBD.

$$\text{Tahun 2003} = \frac{69.426.430}{103.668.609} \times 100\% = \mathbf{67\%}$$

Artinya: besar total belanja pembangunan 67% dari total APBD.

Dari hasil perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin daripada belanja pembangunan, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil, berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat juga cenderung semakin kecil.

4.1.1.4 *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan :
 - a. DSCR minimal 2,5 yang berarti, dengan jumlah perbandingan 2,5, maka diharapkan pinjaman yang dilakukan, akan tetap dapat dibayarkan oleh daerah tersebut, atau dengan kata lain DSCR merupakan ambang batas pelunasan pinjaman yang aman untuk mengendalikan besarnya pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman :
 - a. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.

3. Ketentuan yang menyangkut prosedur :
 - a. Mendapat persetujuan DPRD
 - b. Dituangkan dalam kontrak.

Tabel 4.4
Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Propinsi DIY
Tahun Anggaran 2001 - 2003
(ribuan rupiah)

No	PENDAPATAN	2001	2002	2003
1	Sisa Lebih Perhit. Tahun Lalu	47.510.550	58.035.028	153.635.404
2	Pendapatan Asli Daerah	129.415.456	169.489.773	248.501.101
3	Bagi hasil pajak/bukan pajak	18.069.268	20.154.099	19.670.853
4	DAU	110.360.000	214.480.000	201.960.000
5	DAK/Darurat	111.554.929	0	5.500.000
6	Pinjaman	0	0	0
7	Bagian Lain Penerimaan yang sah	-	7.440.000	27.083.964
	Jumlah	416.910.203	469.598.899	656.351.322
	BELANJA			
8	Pengeluaran Rutin (termasuk	356.102.136	376.348.272	579.783.002
9	untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga)	218.778	209.653	200.528
10	Pengeluaran Pembangunan (bersumber dari PAD & Non PAD)	60.589.289	93.040.975	76.367.792
	Jumlah	416.910.203	469.598.899	656.351.322
	Belanja Wajib (BW)* : (8)	356.102.136	376.348.272	579.783.002
	DSCR** : (2+3+4) - (8)/9	-449,12	132,48	-546,81

Sumber Data : Perhitungan APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2001 - 2003

Dengan data Tabel 4.4 di atas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah , DSCR Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR}_{\text{Th.2001/2002}} &= \frac{(129.415.456 + 18.069.268 + 110.360.000) - (356.102.136)}{218.778} \\
 &= \frac{257.844.724 - 356.102.136}{218.778} \\
 &= \frac{-98.257.412}{218.778} \\
 &= \mathbf{-449,12}
 \end{aligned}$$

Maksimal angsuran pokok pinjaman = tidak boleh meminjam lagi karena DSCR dibawah 2,5

Artinya: besar penjumlahan PAD, BD dan DAU setelah dikurangi BW adalah -449,12 kali dari total angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman, karena besar DSCR tersebut kurang dari 2,5 Propinsi DIY tidak diperkenankan lagi meminjam sebab Propinsi DIY masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan kewajiban pinjaman tahun lalu.

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR}_{\text{Th.2002/2003}} &= \frac{(169.489.773 + 20.154.099 + 214.480.000) - (376.348.272)}{209.653} \\
 &= \frac{404.123.872 - 368.908.272}{209.653} \\
 &= \frac{27.775.600}{209.653} \\
 &= \mathbf{132,48}
 \end{aligned}$$

Maksimal angsuran pokok pinjaman = 27.774.829/ DSCR Minimal 2,5
 = Rp 11.109.932 (dalam ribuan)

Artinya; besar penjumlahan PAD, BD dan DAU setelah dikurangi BW adalah 132,48 kali dari total angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman, karena besar DSCR tersebut lebih besar dari 2,5 maka Propinsi DIY dapat meminjam maksimal sebesar Rp. 27.774.829 (ribuan) dengan angsuran pokok pinjamannya maksimal sebesar Rp. 11.109.932 (ribuan) per tahun anggaran.

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR Th. 2003} &= \frac{(248.501.101+19.670.853+201.960.000) - (579.783.002)}{200.528} \\
 &= \frac{470.131.954 - 579.783.002}{200.528} \\
 &= \frac{-109.651.048}{200.528} \\
 &= -546,81
 \end{aligned}$$

Maksimal angsuran pokok pinjaman = tidak boleh meminjam lagi karena DSCR dibawah 2,5

Artinya; besar penjumlahan PAD, BD dan DAU setelah dikurangi BW adalah -546,81 kali dari total angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman, karena besar DSCR tersebut kurang dari 2,5 Propinsi DIY tidak diperkenankan lagi meminjam sebab Propinsi DIY masih memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban pinjaman tahun lalu

Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Propinsi DIY memiliki kesempatan untuk melakukan

pinjaman. Hal ini karena pada Tahun Anggaran 2002 Propinsi DIY mempunyai DSCR sebesar 132,48 dengan maksimal angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 11.109.932 (ribuan). Hal ini berarti Propinsi DIY memiliki kewajiban untuk mengembalikannya lagi dengan angsuran pokok maksimal Rp. 11.109.932 (ribuan).

4.1.1.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 4.5
Rasio Pertumbuhan APBD Propinsi DIY
Tahun Anggaran 2001 – 2003
(ribuan rupiah)

No.	Keterangan	2001	2002	2003
1	Pendapatan Asli Daerah	129.415.456	169.489.773	248.501.101
2	Pertumbuhan PAD	-	30,96%	46,62%
3	Total Pendapatan	416.910.203	469.598.899	656.351.322
4	Pertumbuhan Pendapatan	-	12,64%	39,77%
5	Belanja Rutin	356.320.914	376.557.924	579.983.530
6	Pertumb.Belanja Rutin	-	5,68%	54,02%
7	Belanja Pembangunan	60.589.289	93.040.975	76.367.792
8	Pertumb.Belanja Pembng	-	53,56%	-17,92%

Sumber Data : APBD Propinsi DIY Tahun Anggaran 2001-2003 (diolah)

NO	KETERANGAN	2001/2002	2002/2003	2003
1	Pertumbuhan PAD	-	30,96%	46,62%
2	Pertumbuhan Pendapatan	-	12,64%	39,77%
3	Pertumb.Belanja Rutin	-	5,68%	54,02%
4	Pertumb.Belanja Pembngn	-	53,56%	-17,92%

Pertumbuhan PAD :

$$R_{2002} = \frac{169.489.773 - 129.415.456}{129.415.456} \times 100\%$$

$$= 30,96 \%$$

Artinya: besar selisih PAD tahun 2002 dan 2001 adalah 30,96% dari PAD tahun 2001.

$$R_{2003} = \frac{248.501.101 - 169.489.773}{169.489.773} \times 100\%$$

$$= 46,62 \%$$

Artinya: besar selisih PAD tahun 2003 dan 2002 adalah 46,62% dari PAD tahun 2002.

Pertumbuhan Pendapatan :

$$R_{2002} = \frac{469.598.899 - 416.910.203}{416.910.203} \times 100\%$$

$$= 12,64 \%$$

Artinya: besar selisih Pendapatan tahun 2002 dan 2001 adalah 12,64% dari Pendapatan tahun 2001.

$$R_{2003} = \frac{656.351.322 - 469.598.899}{469.598.899} \times 100\%$$

$$= 39,77\%$$

Artinya: besar selisih Pendapatan tahun 2003 dan 2002 adalah 39,77% dari Pendapatan tahun 2002.

Pertumbuhan Belanja Rutin :

$$R_{2002} = \frac{376.557.924 - 356.320.914}{356.320.914} \times 100\%$$

$$= 5,68\%$$

Artinya: besar selisih Belanja Rutin tahun 2002 dan 2001 adalah 5,68% dari Belanja Rutin tahun 2001.

$$R_{2003} = \frac{579.983.530 - 376.557.924}{376.557.924} \times 100\%$$

$$= 54,02\%$$

Artinya: besar selisih Belanja Rutin tahun 2003 dan 2002 adalah 54,02% dari Belanja Rutin tahun 2002.

Pertumbuhan Belanja Pembangunan :

$$R_{2002} = \frac{93.040.975 - 60.589.289}{60.589.289} \times 100\%$$

$$= 53,56\%$$

Artinya: besar selisih Belanja Pembangunan tahun 2002 dan 2001 adalah 53,56% dari Belanja Pembangunan tahun 2001

$$\begin{aligned} R_{2003} &= \frac{76.367.792 - 93.040.975}{93.040.975} \times 100\% \\ &= -17,92\% \end{aligned}$$

Artinya: besar selisih Belanja Pembangunan tahun 2003 dan 2002 adalah - 17,92% dari Belanja Pembangunan tahun 2001

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan APBD Propinsi DIY pada tahun anggaran 2001/2002 – 2003 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun Pertumbuhan Belanja Pembangunan pada tahun 2003 cenderung berkurang (negatif). Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DIY dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa Rasio Keuangan pada APBD Propinsi DIY selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001/2002 sampai Tahun Anggaran 2003, secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Propinsi DIY memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.
2. Rasio Efektivitas PAD bertujuan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2001 sebesar 109,94%, tahun 2002 sebesar 118,47% dan tahun 2003 sebesar 105,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam merealisasikan PAD dikatakan efektif karena rasio yang dicapai melebihi 100%.
3. Keserasian Belanja dalam APBD menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Dari hasil penelitian ini Rasio Keserasian

Pemerintah Daerah Propinsi DIY untuk Belanja Rutin pada tahun 2001 sebesar 263% dan belanja pembangunan sebesar 52%. Sedangkan untuk tahun 2002 Belanja Rutinnya sebesar 206% dan Belanja Pembangunan sebesar 53%. Lain halnya dengan tahun 2003 Belanja Rutinnya sebesar 493% dan Belanja Pembangunan sebesar 67%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Propinsi DIY masih memprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Rutin, sehingga Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Hal ini berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Akan tetapi, belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan untuk mengukur kinerja pemerintah terhadap APBD yang ideal.

4. Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Propinsi DIY memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman. Hal ini karena pada Tahun Anggaran 2002 Propinsi DIY mempunyai DSCR sebesar 132,48 dengan maksimal angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 11.109.932 (ribuan).
5. Rata-rata Pertumbuhan PAD dalam kurun waktu analisis yaitu Tahun Anggaran 2001/2002 s/d Tahun Anggaran 2003 rata-rata 38,79%, Pertumbuhan Pendapatan Daerah mencapai rata-rata 26,21%, Pertumbuhan Belanja Rutin mencapai rata-rata 29,85%, sedangkan Pertumbuhan Belanja Pembangunan mencapai rata-rata 17,82%. Hal ini

menunjukkan pertumbuhan APBD Propinsi DIY yang positif. Walaupun, pertumbuhan Belanja Pembangunan mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2003.

6. Dalam melaksanakan pelayanan APBD pada Tahun Anggaran 2001 s/d Tahun Anggaran 2003 sistem yang digunakan dalam penyusunan APBD masih menggunakan sistem anggaran berimbang, dimana jumlah penerimaan daerah sama dengan jumlah pengeluaran. Sehingga secara riil tidak diketahui seberapa besar tingkat defisit anggaran pada tahun yang bersangkutan, namun akan dapat diketahui besarnya defisit melalui jumlah anggaran cadangan yang dibelanjakan.

5.2 SARAN-SARAN

Wujud Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab menuntut Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran. Berkaitan dengan APBD, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Sebagai berikut :

1. Terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi baik subyek maupun obyek pajak yang memungkinkan untuk digali secara optimal. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial masih sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan eksistensi daerah melalui kemandirian dalam bidang pendanaannya.

2. Perlunya Prinsip yang harus dipegang dalam penentuan target pendapatan dan anggaran belanja sebagai suatu perencanaan dan penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah dan potensi daerah.
3. Perlunya Rencana Keuangan Jangka Panjang yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas program dan perencanaan, dengan memperhatikan sumber dana yang terbatas dan disisi lain pengeluaran yang harus dibiayai semakin besar.
4. Upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah harus lebih mencerminkan kinerja aparat yang profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan antara lain menggabungkan Dinas Pendapatan Daerah dengan Bagian Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), demi koordinasi pendekatan pelayanan dan sistem informasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arja Sadjiarto, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 2, Nopember 2000, hal. 138-150.
- Banu Witono, *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, April 2002, hal. 12-23.
- Baswir, R, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mardiasmo, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah : Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik*, JAAI, Vol. 4, No. 1, Juni 2000, hal. 35-49.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2001, Hal 441-456.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, (KOMPAK) STIE "YO" Yogyakarta, No.21, Oktober 1999, hal. 385 – 402.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah", Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 1999.
- _____, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 1999.

—————, “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 2002.

—————, “Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 2002.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

A. REALISASI PENDAPATAN.
 REALISASI BELANJA.
 SISA LEBIH SEBESAR.

Rp. 433.827.275.345,99
 Rp. 329.286.199.044,61
 Rp. 104.541.076.301,38

B. PENERIMAAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP).
 PENGELUARAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.
 SISA LEBIH UKP SEBESAR.

Rp. 22.947.360.744,00
 Rp. 22.890.346.280,00
 Rp. 57.014.464,00

terdiri dari :

- Sisa Lebih.
- Sisa Kurang.

Rp. 75.542.937,00
 Rp. (18.528.473,00)

C. JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN (A + B).

Rp. 104.598.090.765,38

terdiri dari :

1. Sisa Kas
2. Sisa Kas khusus gaji.
3. Sisa UUDP :

Rp. 95.058.880.072,38
 Rp. 1.295.080.950,00
 Rp. 9.539.210.693,00
 Rp. 104.598.090.765,38

Sisa UUDP Rutin :

Rp. 8.662.291.209,00

Sisa UUDP Pembangunan :

Rp.

Rp. 876.919.484,00

R I N G K A S A N
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2001.

No	Uraian	Jumlah		Selisih	%	No	Uraian	Jumlah		Selisih	%
		Rencana	Realisasi					Rencana	Realisasi		
1	A.			5(4-3)	6	7	MENGHILANGKAN RUTIN	9	10	11(10-9)	12
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	47.510.549.687,70	47.510.549.687,70	0,00	100,00	1.	Belanja Pegawai.	184.258.350.083,00	161.381.141.778,50	(22.877.208.304,50)	87,58
						2.	Belanja Non Pegawai.	172.062.533.792,57	113.594.191.303,22	(58.468.342.489,35)	
						a.	Belanja Barang.	25.215.065.606,00	22.351.478.817,22	(2.863.586.788,78)	88,64
						b.	Belanja Pemeliharaan.	4.294.334.835,00	3.900.171.657,00	(394.163.178,00)	90,82
						c.	Belanja Perjalanan Dinas.	2.316.940.530,00	1.924.754.800,00	(392.185.730,00)	83,07
						d.	Belanja Lain-lain.	0,00	0,00	0,00	
						e.	Anggaran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	218.778.400,00	218.778.400,00	0,00	100,00
						f.	Gambaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan.	35.731.626.300,00	35.708.313.000,00	(23.313.300,00)	99,93
						g.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	87.586.789.960,00	48.983.264.062,00	(38.603.525.898,00)	55,93
						h.	Pengeluaran Tidak Terselesaikan.	16.698.998.161,57	507.430.667,00	(16.191.567.524,57)	3,04
						B.	BELANJA PEMBIANGUNAN	60.589.288.867,00	54.310.862.962,89	(6.278.425.904,11)	89,64
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.	239.984.197.280,34	244.031.833.674,08	4.047.636.393,74	101,69	1.	Sektor Industri	464.239.000,00	457.543.400,00	(6.695.600,00)	98,56
						2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	4.496.783.167,00	4.027.282.111,00	(469.401.056,00)	89,56
						3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	891.966.400,00	681.722.859,00	(213.243.541,00)	76,17
						4.	Sektor Tenaga Kerja	583.200.000,00	582.725.400,00	(474.600,00)	99,92
						5.	Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah Kruangan dan Kopras	4.822.300.000,00	1.711.081.290,00	(3.111.218.710,00)	35,48
						6.	Sektor Transportasi	4.412.629.500,00	4.285.558.653,89	(127.070.846,11)	97,12
						7.	Sektor Pertambangan dan Energi	344.500.000,00	305.962.100,00	(38.537.900,00)	88,81
						8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	2.946.500.000,00	2.624.305.911,00	(322.193.089,00)	92,19
						9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	435.500.000,00	431.463.585,00	(4.036.415,00)	99,07
						10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.072.000.000,00	1.778.429.069,00	(293.570.931,00)	85,83
						11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga	2.942.100.000,00	2.252.014.625,00	(690.085.375,00)	76,51
						12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	64.000.000,00	63.517.150,00	(482.850,00)	99,29

No	Uraian	Jumlah		%	No	Uraian	Jumlah		Selisih	%
		Rencana	Realisasi				Rencana	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8		
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perumahan, Anak dan Remaja	2.668.824.000,00	2.400.403.450,00	(268.420.550,00)	89,94
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	5.696.391.000,00	5.664.532.915,00	(31.858.085,00)	99,44
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	15	Sektor Agama	729.832.000,00	706.902.620,00	(22.929.380,00)	96,86
					16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	919.300.000,00	848.146.025,00	(71.153.975,00)	92,26
					17	Sektor Ilukun	319.000.000,00	309.867.300,00	(9.132.700,00)	97,14
					18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	24.756.874.800,00	24.080.939.444,00	(675.935.356,00)	97,27
					19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	430.500.000,00	408.351.805,00	(22.148.195,00)	94,86
					20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	689.849.000,00	688.982.250,00	(866.750,00)	99,87
	JUMLAH I S/D 4 :	416.910.202.742,57	433.627.275.345,99	104,06		JUMLAH I A + B :	416.910.202.742,57	329.286.199.044,61	(87.624.003.697,96)	78,98
5	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	25.842.022.421,00	22.947.360.744,00	88,80		URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :	25.842.022.421,00	22.890.346.289,00	(2.951.676.141,00)	88,58
						a. Urusan Kas dan Perhitungan Rutin.	25.842.022.421,00	22.890.346.289,00	(2.951.676.141,00)	88,58
						b. Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan.	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH II SEMUA :	442.752.225.163,57	456.774.636.089,99	103,17		JUMLAH II SEMUA :	442.752.225.163,57	352.176.545.324,61	(90.575.679.838,96)	79,54

Jumlah Pendapatan : Rp. 456.774.636.089,99
 Jumlah Belanja : Rp. 352.176.545.324,61
 Saldo : Rp. 104.598.090.765,38

LAMPIRAN :II.

R I N G K A S A N

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

BAB I : PENDAPATAN.

No	Uraian	Jumlah		Selisih	%
		Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6
A.	<u>PENERIMAAN DAERAH</u>	416.910.202.742,57	433.827.275.345,99	16.917.072.603,42	104,06
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu.	47.510.549.687,70	47.510.549.687,70	0,00	100,00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.415.455.774,53	142.284.891.984,21	12.869.436.209,68	109,94
	a. Pajak Daerah.	116.300.032.349,71	123.516.267.076,36	7.216.234.726,65	106,20
	b. Retribusi Daerah.	3.341.768.950,00	3.964.474.901,00	622.705.951,00	118,63
	c. Bagian Laba Usaha Daerah.	4.751.217.404,82	4.385.830.635,47	(365.386.769,35)	92,31
	d. Lain - lain Pendapatan	5.022.437.070,00	10.418.319.371,38	5.395.882.301,38	207,44
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.	239.984.197.280,34	244.031.833.674,08	4.047.636.393,74	101,69
	a. Bagi Hasil Pajak.	14.551.054.876,00	21.091.032.932,22	6.539.978.056,22	144,95
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA.	3.518.212.904,34	1.151.071.475,86	(2.367.141.428,48)	32,72
	c. Dana Alokasi Umum.	110.360.000.000,00	110.234.799.266,00	(125.200.734,00)	99,89
	d. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	100,00
	e. Dana Darurat.	111.554.929.500,00	111.554.930.000,00	500,00	100,00
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	
	a. Pinjaman Dalam Negeri.	0,00	0,00	0,00	
	b. Pinjaman Luar Negeri.	0,00	0,00	0,00	
	J U M L A H 1 S/D 4 :	416.910.202.742,57	433.827.275.345,99	16.917.072.603,42	104,06
5	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	25.842.022.421,00	22.947.360.744,00	(2.894.661.677,00)	88,80
	J U M L A H S E M U A :	442.752.225.163,57	456.774.636.089,99	14.022.410.926,42	103,17

RINGKASAN

LAMPIRAN III.

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2001.

BAB II : BELANJA

No	Uraian	Rencana		Selisih	%
		3	4		
1	2	3	4	5	6
A.	PENGELUARAN RUTIN	356.320.913.875,57	274.975.336.081,72	(81.345.577.793,85)	(22,83)
1.	Belanja Pegawai.	184.258.380.083,00	161.381.144.778,50	(22.877.235.304,50)	(12,42)
2.	Belanja Barang.	25.215.065.606,00	22.351.478.817,22	(2.863.586.788,78)	(11,36)
3.	Belanja Pemeliharaan.	4.294.334.835,00	3.900.171.657,00	(394.163.178,00)	(9,18)
4.	Belanja Perjalanan Dinas.	2.316.940.530,00	1.924.754.800,00	(392.185.730,00)	(16,93)
5.	Belanja Lain - lain.	0,00	0,00	0,00	
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	218.778.400,00	218.778.400,00	0,00	0,00
7.	Belanja Pesun dan Onderstand.	0,00	0,00	0,00	
8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawah.	35.731.626.300,00	35.708.313.000,00	(23.313.300,00)	(0,07)
9.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	87.586.789.960,00	48.985.264.062,00	(38.603.525.898,00)	(44,07)
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	16.698.998.161,57	507.430.567,00	(16.191.567.594,57)	(96,96)
11.	PENGELUARAN UKP.	25.842.022.421,00	22.890.346.280,00	(2.951.676.141,00)	(11,42)
	JUMLAH BELANJA RUTIN DAN UKP.	382.162.936.296,57	297.865.682.361,72	(84.297.253.934,85)	(34,25)

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN PER SEKTOR YA 2001

Pasal	Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Pengeluaran SPJ	Sisa dari Jumlah Anggaran Dikurang Pengeluaran	Keterangan
		3	5	8	7
2P.0.1	Sektor Industri	464.239.000,00	457.543.400,00	(6.695.600,00)	
2P.0.2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	4.496.783.167,00	4.027.382.111,00	(469.401.056,00)	
2P.0.3	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	894.966.400,00	681.722.859,00	(213.243.541,00)	
2P.0.4	Sektor Tenaga Kerja	583.200.000,00	582.725.400,00	(474.600,00)	
2P.0.5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah,	4.822.300.000,00	1.711.081.290,00	(3.111.218.710,00)	
2P.0.6	Sektor Transportasi	4.412.629.500,00	4.286.558.653,89	(126.070.846,11)	
2P.0.7	Sektor Pertambangan dan Energi	344.500.000,00	305.962.100,00	(38.537.900,00)	
2P.0.8	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	2.846.500.000,00	2.624.306.911,00	(222.193.089,00)	
2P.0.9	Sektor Pembangunan Daerah dan Permukiman	435.500.000,00	431.463.585,00	(4.036.415,00)	
2P.0.10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.072.000.000,00	1.778.429.069,00	(293.570.931,00)	
2P.0.11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,	2.942.100.000,00	2.252.014.625,00	(690.085.375,00)	
2P.0.12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	64.000.000,00	63.547.150,00	(452.850,00)	
2P.0.13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial,	2.668.824.000,00	2.400.403.450,00	(268.420.550,00)	
2P.0.14	Sektor Perumahan dan Permukiman	5.696.391.000,00	5.664.532.915,00	(31.858.085,00)	
2P.0.15	Sektor Agama	729.832.000,00	706.902.620,00	(22.929.380,00)	
2P.0.16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	919.300.000,00	848.146.025,00	(71.153.975,00)	
2P.0.17	Sektor Hukum	319.000.000,00	309.867.300,00	(9.132.700,00)	
2P.0.18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	24.756.874.800,00	24.080.939.444,00	(675.935.356,00)	
2P.0.19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan	430.500.000,00	408.351.805,00	(22.148.195,00)	
2P.0.20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	689.849.000,00	688.982.250,00	(866.750,00)	
J U M L A H :		60.589.288.867,00	54.310.862.962,89	(6.278.425.904,11)	

TAHUN ANGGARAN : 2001.

CONTOH : C.II.

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERHITUNGAN KAS

Sisa Kas Tanggal 31 Desember 2000 Rp 43.248.846.195,70

Ditambah :

Penerimaan dari 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2001 tahun perhitungan.

a. Mengenai Tahun Dinas .

Perhitungan (2001)	Rp	509.515.100.687,07	
dikurangi pengembalian.	Rp	<u>44.190.948.431,00</u>	Rp 465.324.152.256,07

b. Penyetoran Kembali Sisa Rp 4.279.555.512,00

UUDP Tahun Lalu. Rp 512.852.553.963,77

Dikurangi :

Pengeluaran dari 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2001 tahun perhitungan :

a. Mengenai Tahun Dinas

Perhitungan (2001)	Rp	420.052.825.246,39	
dikurangi Kontra Pos.	Rp	<u>3.554.232.305,00</u>	Rp 416.498.592.941,39
	Rp		<u><u>96.353.961.022,38</u></u>

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN DAN SISA KAS

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN.

a. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini.	Rp	0,00
b. Sisa Perhitungan APBD tahun 2001 (Tahun Dinas Perhitungan)		
	Rp	<u>104.541.076.301,38</u>
	Rp	<u>104.541.076.301,38</u>

B. SISA KAS PER 31 DESEMBER 2001 Rp 96.353.961.022,38

Ditambah karena :

1. Pembukuan – Pembukuan karena penyetoran Sisa UUDP (Tahun Dinas Perhitungan antara 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2001 (bulan berikutnya tahun dinas perhitungan). Rp 8.244.129.743,00
2. Pembukuan – Pembukuan Administratif 2001 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan pembebanan tahun berikutnya. Rp 18.528.473,00
Rp 8.262.658.216,00

Dikurangi dengan :

Pembukuan Administratif yang mengurangi sisa perhitungan tahun 2001 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya. Rp 75.542.937,00

Rp 8.187.115.279,00Rp 104.541.076.301,38

Tahun Anggaran : 2001.

LAMPIRAN :

CONTOH : C-III

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAFTAR HUTANG--HUTANG/KEWAJIBAN YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI PENUTUPAN ANGGARAN
DAN BELUM KEDALUWARSA.**

TAHUN TAGIHAN	NAMA YANG MENAGHII (KREDITOR)	URAIAN HUTANG/KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH Rp	KETERANGAN SEBAB--SEBAB BELUM DIBAYAR
1	2	3	4	5
1982/1983	Pemerintah Pusat	Pinjaman Pemerintah Propinsi DIY dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringharjo.	850.000.000,00	Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor RDI--225/DDM/1990 tanggal 6 Juni 1990. Jangka Angsuran 20 Tahun termasuk tenggang waktu 5 tahun (angsuran ke 12 dan 13).
JUMLAH :			850.000.000,00	

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

PERHITUNGAN APBD PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2002.

A. REALISASI PENDAPATAN.
REALISASI BELANJA.
SISA LEBIH SEBESAR.

Rp. 551.905.996.650,62
Rp. 398.270.592.526,81
Rp. 153.635.404.123,81

B. PENERIMAAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP).
PENGELUARAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.
SISA LEBIH UKP SEBESAR.

Rp. 21.637.233.544,00
Rp. 21.410.593.552,00
Rp. 226.639.992,00

Sisa UKP terdiri dari :

- Sisa Lebih.
- Sisa Kurang.

Rp. 241.639.992,00
Rp. (15.000.000,00)

C. JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN (A + B).

Rp. 153.862.044.115,81

Sisa Lebih perhitungan terdiri dari :

1. Sisa Kas
2. Sisa Kas khusus gaji.
3. Sisa UUDP :

Rp. 84.331.859.636,81
Rp. 60.712.980.680,00
Rp. 8.817.203.799,00

Sisa UUDP terdiri dari :

Rp. 153.862.044.115,81

Sisa UUDP Rutin :
Sisa UUDP Pembangunan :

Rp. 5.792.863.094,00
Rp. 3.024.340.705,00

RINGKASAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2002.

No	Uraian	Jumlah			%	Salah	Uraian			%	Jumlah			Salah	%			
		Rencana					Realisasi				Rencana					Realisasi		
		3	4	5 (4-3)			6	7	8		9	10	11 (10-9)			12	13	14
A. PENERIMAAN DAERAH																		
PENGELUARAN RUTIN																		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	58.035.025,273,43	102.126.327.681,38	44.091.299.407,95	175,97							248.783.222.283,00	203.577.599.315,00	(45.255.622.768,00)	81,81			
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: SENDIRI:	169.489.772.567,57	200.808.256.770,77	31.318.484.203,20	118,48							127.774.702.547,90	113.748.139.913,69	(14.026.562.434,21)	91,63			
	a. Pajak Daerah.	135.400.413.147,25	175.519.260.386,53	24.118.847.239,28	115,93							28.280.941.547,00	25.913.468.666,00	(2.367.472.881,00)	91,76			
	b. Retribusi Daerah.	4.049.952.600,00	5.094.751.303,00	1.044.798.703,00	125,80							9.413.173.823,00	8.637.318.144,00	(775.857.677,00)	91,76			
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kelayakan Daerah Yang dipisahkan.	7.577.808.381,82	6.798.088.603,85	(779.719.777,97)	89,71							7.133.044.888,00	6.584.797.538,00	(548.247.350,00)	92,31			
	d. Lain - lain Pendapatan Yang Sah.	6.461.598.438,50	13.396.156.273,39	6.934.557.834,89	207,32							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.	234.634.098.599,00	240.977.802.168,47	6.293.703.569,47	102,68							299.833.400,00	209.833.400,00	(89.999.999,99)	100,00			
	a. Bagi Hasil Pajak.	20.154.098.599,00	26.446.557.030,00	6.292.458.431,00	131,22							64.771.994.347,00	64.230.724.493,69	(541.269.853,31)	94,19			
	b. Bagi Hasil Belas Jasa Pajak Sumber Daya Alam.	0,00	1.245.134,47	1.245.134,47								10.490.592.341,00	7.977.789.384,00	(2.512.802.957,00)	74,05			
	c. Dana Alokasi Umum (DAU).	214.480.000.000,00	214.480.000.000,00	0,00	100,00							5.475.500.000,99	194.388.250,00	(5.280.911.750,99)	3,53			
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK).	0,00	0,00	0,00								93.040.974.310,00	80.994.833.098,12	(12.046.121.711,88)	87,05			
	e. Dana Darurat.	0,00	0,00	0,00								1.663.490.000,00	1.654.246.500,00	(9.243.500,00)	99,44			
												5.440.768.600,00	5.142.071.443,00	(298.697.157,00)	94,31			
												3.328.388.500,00	1.685.990.494,40	(1.642.398.005,60)	50,65			
												741.825.000,00	740.629.500,00	(1.204.500,00)	99,84			
												2.721.297.000,00	2.200.704.980,00	(520.592.020,00)	80,87			
												13.500.462.930,00	13.047.948.563,97	(452.514.366,03)	94,10			
												468.000.000,00	433.070.390,00	(34.929.610,00)	94,81			
												2.999.100.800,00	2.903.811.177,00	(95.288.623,00)	94,89			
												6.752.840.000,00	1.560.214.943,00	(5.192.625.057,00)	23,10			
												6.752.210.180,00	5.482.290.753,75	(1.269.919.426,25)	81,19			
												16.863.876.000,00	16.158.296.733,00	(705.579.267,00)	95,82			
												93.000.000,00	76.640.700,00	(16.359.300,00)	80,67			

No	Uraian	Jumlah			Selisih	%	No	Uraian	Jumlah		Selisih	%
		Rencana	Realisasi	3					4	Rencana		
1	2					5	6					
4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00		13.	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.	4.477.903.000,00	4.062.471.270,00	(365.431.730,00)	91,73	
	a. Pinjaman Dalam Negeri.	0,00	0,00	0,00		14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	4.271.965.000,00	3.828.294.135,00	(443.670.865,00)	89,61	
						15	Sektor Agama	282.800.000,00	280.403.750,00	(2.396.250,00)	99,15	
	b. Pinjaman Luar Negeri.	0,00	0,00	0,00		16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.041.225.000,00	1.716.529.731,00	(324.695.269,00)	84,09	
						17	Sektor Hukum	705.000.000,00	600.834.800,00	(104.165.200,00)	85,22	
						18	Sektor Aparatur Negara dan Pegawai	16.373.388.200,00	13.723.362.280,00	(2.650.025.920,00)	84,32	
						19	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Infor masi dan Komunikasi.	3.853.145.400,00	2.874.430.315,00	(978.715.085,00)	74,61	
						20	Sektor Pertahanan dan Keamanan.	808.290.000,00	800.617.540,00	(7.672.460,00)	99,05	
		7.440.000.000,00	8.043.610.030,00	603.610.030,00	108,11							
5	BAGIAN LAIN-LAIN PENJEMBAHAN YANG SAJI.											
	a. Pemukiman dan Pemukiman Dana Komunitas.											
	b. Pemukiman dari Pemukiman Dana Penyisihan.											
	JUMLAH 1 SD/4 :	469.598.899.440,90	551.905.996.650,62	82.307.097.210,62	117,53		JUMLAH A + B :	469.598.899.440,90	398.270.392.524,81	(71.328.506.916,09)	84,81	
6	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	29.763.944.954,90	21.637.233.544,00	(8.126.711.410,90)	72,70		URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :	29.763.944.954,00	21.410.593.552,00	(8.353.351.402,00)	71,99	
							a. Urusan Kas dan Perhitungan Rutin.	29.763.944.954,00	21.410.593.552,00	(8.353.351.402,00)	71,99	
							b. Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan.	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH SEMUA :	499.362.844.394,90	573.543.230.194,62	74.180.385.799,72	114,66		JUMLAH SEMUA :	499.362.844.394,90	419.681.186.078,81	(79.681.658.316,09)	84,04	

Yogyakarta,

2003.

Jumlah Pendapatan : Rp. 573.543.230.194,62
 Jumlah Belanja : Rp. 419.681.186.078,81
 S a l d o : Rp. 153.862.044.115,81

Terdiri dari :

- Sisa Kas. 105.524.141.342,81
- Sisa Kas Khusus Gaji. 39.520.698.974,00
- Sisa UUD/P Rutin. 5.792.863.094,00
- Sisa UUD/P Pembangunan. 3.024.340.705,00

145.044.840.316,81

8.817.203.799,00

153.862.044.115,81

No	Uraian	Jumlah			Selisih	%	Keterangan.
		Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7	
PENERIMAAN DAERAH							
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	58.035.028.273,43	102.126.327.691,38	44.091.299.407,95		175,97	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI :	169.489.772.567,57	200.808.256.770,77	31.318.484.203,20		118,48	
	a. Pajak Daerah.	151.400.413.147,25	175.519.260.386,53	24.118.847.239,28		115,93	
	b. Retribusi Daerah.	4.049.952.600,00	5.094.751.305,00	1.044.798.705,00		125,60	
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Terpisah.	7.577.808.381,82	6.798.088.803,85	(779.719.577,97)		89,71	
	d. Lain - lain Pendapatan Yang Sah.	6.481.598.438,50	13.396.156.275,39	6.934.557.836,89		207,32	
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.	234.634.098.599,00	240.927.802.168,47	6.293.703.569,47		102,68	
	a. Bagi Hasil Pajak.	20.154.098.599,00	26.446.557.030,00	6.292.458.431,00		131,22	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam.	0,00	1.245.138,47	1.245.138,47			
	c. Dana Alokasi Umum.(DAU).	214.480.000.000,00	214.480.000.000,00	0,00		100,00	
	d. Dana Alokasi Khusus.(DAK).	0,00	0,00	0,00			
	e. Dana Darurat.	0,00	0,00	0,00			
4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH.	0,00	0,00	0,00			
	a. Pinjaman Dalam Negeri.	0,00	0,00	0,00			
	b. Pinjaman Luar Negeri.	0,00	0,00	0,00			
5.	BAGIAN LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAH.						
	Penyerahan dari Pemerintah Dana Kontinjensi.	7.440.000.000,00	8.043.610.030,00	603.610.030,00		108,11	
	Penyerahan dari Pemerintah Dana Penyeimbang.	489.598.899.440,00	551.905.986.650,62	82.307.087.210,62		117,53	
6	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	29.763.944.954,00	21.637.233.544,00	(8.126.711.410,00)		72,70	
J U M L A H 1 S/D 4 :							
J U M L A H S E M U A :		499.362.844.394,90	573.543.230.194,62	74.180.385.799,72		114,86	

RINGKASAN

BAB II : BELANJA
 PEMERINTAH ANGKARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2002

No	Uraian	Jumlah		Selisih	%	KETERANGAN.
		Rencana	Realisasi			
7	8	9	10	11 (10-9)	12	13
A.	PENGELUARAN RUTIN	376.557.924.630,90	317.275.739.428,69	(59.282.185.202,21)	(15,74)	
1.	Belanja Pegawai.	248.763.222.283,00	203.527.599.515,00	(45.255.622.768,00)	(18,19)	
2.	Belanja Non Pegawai.	127.774.702.347,90	113.748.139.913,69	(14.026.562.434,21)	(10,98)	
a.	Belanja Barang.	28.280.941.547,00	25.913.468.686,00	(2.367.472.861,00)	(8,37)	
b.	Belanja Pemeliharaan.	9.413.175.825,00	8.637.318.148,00	(775.857.677,00)	(8,24)	
c.	Belanja Perjalanan Dinas.	7.133.044.880,00	6.584.797.550,00	(548.247.330,00)	(7,69)	
d.	Belanja Lain-lain.	0,00	0,00	0,00		
e.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	209.653.400,00	209.653.400,00	0,00	0,00	
f.	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.	66.771.994.347,00	64.230.724.493,69	(2.541.269.853,31)	(3,81)	
g.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	10.490.592.348,00	7.977.789.386,00	(2.512.802.962,00)	(23,95)	
h.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	5.475.300.000,90	194.388.250,00	(5.280.911.750,90)	(96,45)	
	JUMLAH PENGELUARAN	376.557.924.630,90	317.275.739.428,69	(59.282.185.202,21)	(15,74)	
	JUMLAH PENGELUARAN UKP.	29.763.944.954,00	21.410.593.552,00	(8.353.351.402,00)	(28,07)	
	JUMLAH SEMUA PENGELUARAN	406.321.869.584,90	338.686.332.980,69	(67.635.536.604,21)	(16,65)	

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2002.**

No	Uraian	Jumlah			%
		Rencana 3	Realisasi 4	Selisih (3-4) 5	
B.	BELANJA PEMBANGUNAN	93.040.974.810,00	80.994.853.098,12	(12.046.121.711,88)	87,05
1.	Sektor Industri	1.663.490.000,00	1.654.246.550,00	(9.243.450,00)	99,44
2.	Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.	5.440.768.600,00	5.142.071.445,00	(298.697.155,00)	94,51
3.	Sektor Pengairan.	3.328.388.500,00	1.685.990.496,40	(1.642.398.003,60)	50,65
4.	Sektor Tenaga Kerja	741.825.000,00	740.620.500,00	(1.204.500,00)	99,84
5.	Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah Keuangan dan Koperasi	2.721.297.000,00	2.200.706.980,00	(520.590.020,00)	80,87
6.	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika.	13.300.462.930,00	13.047.948.562,97	(252.514.367,03)	98,10
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	468.000.000,00	453.070.390,00	(14.929.610,00)	96,81
8.	Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika.	2.999.100.000,00	2.905.811.177,00	(93.288.823,00)	96,89
9.	Sektor Pembangunan Daerah .	6.752.840.000,00	1.560.214.945,00	(5.192.625.055,00)	23,10
10.	Sektor sumberdaya alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	6.752.210.180,00	5.482.290.755,75	(1.269.919.424,25)	81,19
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan olahraga.	16.863.876.000,00	16.158.296.735,00	(705.579.265,00)	95,82
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga.	95.000.000,00	76.640.700,00	(18.359.300,00)	80,67
13.	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.	4.427.903.000,00	4.062.471.270,00	(365.431.730,00)	91,75
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	4.271.965.000,00	3.828.294.155,00	(443.670.845,00)	89,61
15.	Sektor Agama	282.800.000,00	280.403.750,00	(2.396.250,00)	99,15
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.041.225.000,00	1.716.529.751,00	(324.695.249,00)	84,09
17.	Sektor Hukum	705.000.000,00	600.834.800,00	(104.165.200,00)	85,22
18.	Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	16.323.388.200,00	15.723.362.280,00	(600.025.920,00)	96,32
19.	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Infor masi dan Komunikasi.	3.053.145.400,00	2.874.430.315,00	(178.715.085,00)	94,15
20.	Sektor Pertahanan dan Keamanan.	808.290.000,00	800.617.540,00	(7.672.460,00)	99,05

TAHUN ANGGARAN : 2002.

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERHITUNGAN KAS

Sisa Kas Tanggal 31 Desember 2002.	Rp	95.058.880.072,38
Ditambah :		
Penerimaan dari 1 Januari sampai dengan		
31 Desember 2002 tahun perhitungan.		
a. Mengenai Tahun Dinas		
Perhitungan (2002)	Rp 233.139.334.258,56	
dikurangi pengembalian.	Rp 0,00 Rp	233.139.334.258,56
b. Penyetoran Kembali Sisa UUDP tahun lalu.		
	Rp	6.638.882.467,00
	Rp	334.837.096.797,94
c. Ditambah penerimaan DAU.		
	Rp	235.672.281.706,00
JUMLAH PENERIMAAN.		
	Rp	570.509.378.503,94
Dikurangi :		
Pengeluaran dari 1 Januari sampai dengan		
31 Desember 2002 tahun perhitungan :		
a. Mengenai Tahun Dinas		
Perhitungan (2002)	Rp 250.505.237.161,13	
b. Ditambah pengeluaran DAU.		
	Rp 174.959.301.026,00 Rp	425.464.538.187,13
	Rp	<u>145.044.840.316,81</u>
Terdiri :		
	kas umum	84.331.859.636,81
	kas khusus	60.712.980.680,00

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN DAN SISA KAS**

. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN.

. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini.

Rp 0,00

. Sisa Perhitungan APBD tahun 2002
(Tahun Dinas Perhitungan)

Rp 153.635.404.123,81

Rp 153.635.404.123,81

. SISA KAS PER 31 DESEMBER 2002 :

- SISA KAS.

Rp 84.331.859.636,81

- SISA KAS KHUSUS GAJI.

Rp 60.712.980.680,00

itambah karena :

Pembukuan – Pembukuan karena penyetoran Sisa UUDP (Tahun Dinas Perhitungan antara 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 (bulan berikutnya tahun dinas perhitungan).

Rp 8.817.203.799,00

Pembukuan – Pembukuan Administratif 2002 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan beban tahun berikutnya.

Rp 15.000.000,00

Rp 8.832.203.799,00

Dikurangi dengan :

Pembukuan Administratif yang mengurangi sisa perhitungan tahun 2002 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan beban tahun berikutnya.

Rp 241.639.992,00

Rp 241.639.992,00

Sisa Perhitungan APBD tahun 2002

Rp 153.635.404.123,81

TAHUN ANGGARAN : 2002.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAFTAR HUTANG – HUTANG/KEWAJIBAN YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI PENUTUPAN ANGGARAN
DAN BELUM KEDALUWARSA

CONTOH : C.III.

1	2	3	4	5
Tahun Tagihan	Nama Yang Menagih (Kreditor)	Uraian Hutang Kewajiban Yang Harus Dibayar	Jumlah RP.	Keterangan Sebab – Sebab Belum Dibayar
1990/1991	Pemerintah Pusat	Pinjaman Pemerintah Daerah Propinsi DIY. dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringharjo.	750.000.000,00	Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor RDI – 225/DDI/1990 Tanggal 6 Juni 1990. Pinjaman Sebesar : Rp 1.500.000.000,00 Jangka Angsuran 20 Tahun Termasuk Tenggang waktu 5 Tahun. Suku bunga 9 %. setahun.
			750.000.000,00	

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

PERHITUNGAN APBD PROPINSI DIY TAHUN ANGGARAN 2003

A. REALISASI PENDAPATAN.
REALISASI BELANJA.
SISA LEBIH SEBESAR.

Rp. 683.937.230.789,30
Rp. 580.253.697.906,53
Rp. 103.683.532.882,77

B. PENERIMAAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP).
PENGELUARAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.
SISA LEBIH UKP SEBESAR.

Rp. 24.233.345.742,00
Rp. 24.248.269.743,00
Rp. (14.924.001,00)

terdiri dari :

– Sisa Lebih.

– Sisa Kurang.

Rp. 115.608,00

Rp. (15.039.609,00)

C. JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN (A + B).

Rp. 103.668.608.881,77

terdiri dari :

1. Sisa Kas

2. Sisa Kas khusus gaji.

4. Sisa UUDP :

Tediri dari :

Rp. 22.350.340.400,77

Rp. 73.670.820.104,00

Rp. 7.647.448.377,00

Rp. 103.668.608.881,77

Sisa UUDP Rutin :

Sisa UUDP Pembangunan :

Rp. 6.989.932.092,00

Rp. 657.516.285,00

D. DEPOSITO PADA BANK BPD DIY.

Rp. 80.000.000.000,00

Rp. 183.668.608.881,77

RINGKASAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROFESI DYI TAHUN ANGGARAN 2003.

No	Uraian	Jumlah			% No	Uraian	Jumlah			%	
		Kecana	Realisasi	Selish			Kecana	Realisasi	Selish		
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7	8	9	10	11 (10-9)	12
A.	PEMERINTAHAN DAERAH					A.					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu.	153.035.404.123,81	153.062.044.115,81	226.639.992,00	0,15	1. Belanja Pegawai	51.983.379.646,69	510.827.268.161,05	74.326.660.779,44	(74.326.660.779,44)	(12,82)
						2. Belanja Non Pegawai.	234.029.944.050,00	206.010.177.012,00	(28.019.767.038,00)	(28.019.767.038,00)	(11,97)
						a. Belanja Harag.	42.736.091.454,00	37.365.692.162,00	(5.370.399.294,00)	(5.370.399.294,00)	(12,10)
						b. Belanja Pemeliharaan.	27.766.035.506,00	243.375.869.174,00	(33.190.146.332,00)	(33.190.146.332,00)	(11,99)
						c. Belanja Perjalanan Dinas.	300.217.494.140,69	267.251.398.987,05	(33.966.095.153,64)	(33.966.095.153,64)	(11,16)
						d. Belanja Lain-lain.	51.046.009.402,00	47.250.897.000,37	(4.595.162.321,63)	(4.595.162.321,63)	(8,86)
						e. Anggaran Pijamaan/lewat dan Hanga.	22.937.334.761,00	22.048.957.699,00	(888.377.062,00)	(888.377.062,00)	(3,87)
						f. Bagi Hasil dan Batasan Keuangan	9.455.068.360,00	8.093.152.600,00	(1.359.915.760,00)	(1.359.915.760,00)	(14,39)
						g. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						h. Pengeluaran Tidak Tersanga.	290.528.400,00	200.328.400,00	(90.200.000,00)	(90.200.000,00)	(30,72)
							87.008.439.653,31	76.409.499.846,68	(11.598.939.806,63)	(11.598.939.806,63)	(13,32)
							25.263.016.928,00	24.487.363.960,00	(775.652.968,00)	(775.652.968,00)	(3,07)
							105.707.096.644,38	87.958.829.401,00	(17.748.267.243,38)	(17.748.267.243,38)	(16,79)
						B. BELANJA PEMBANGUNAN	76.367.792.150,00	69.426.429.743,48	(6.941.362.404,52)	(6.941.362.404,52)	(9,09)
1.						1. Sektor Industri	2.003.730.000,00	1.894.262.950,00	(109.467.050,00)	(109.467.050,00)	(5,46)
						2. Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.	3.876.590.000,00	3.630.124.190,00	(246.465.810,00)	(246.465.810,00)	(6,36)
						3. Sektor Pengairan.	1.653.900.000,00	1.515.452.222,00	(138.447.778,00)	(138.447.778,00)	(8,37)
						4. Sektor Tenaga Kerja	1.798.500.000,00	1.797.248.100,00	(1.251.900,00)	(1.251.900,00)	(0,07)
						5. Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah Keuangan dan Koperasi	3.295.816.000,00	3.282.952.270,00	(12.863.730,00)	(12.863.730,00)	(0,39)
						6. Sektor Transportasi, Meteorologi dan Cincin.	18.038.384.300,00	17.899.291.959,48	(137.092.340,52)	(137.092.340,52)	(0,76)
						7. Sektor Pertambangan dan Energi	220.000.000,00	204.256.500,00	(15.743.500,00)	(15.743.500,00)	(7,16)
						8. Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika.	1.530.000.000,00	1.432.584.400,00	(97.415.600,00)	(97.415.600,00)	(6,37)
						9. Sektor Pembangunan Daerah.	7.598.268.000,00	2.357.466.385,00	(5.040.801.615,00)	(5.040.801.615,00)	(66,13)
						10. Sektor sumberdaya alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1.774.561.250,00	1.731.053.917,00	(43.507.333,00)	(43.507.333,00)	(2,45)
						11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga.	10.637.332.000,00	10.168.777.107,00	(468.554.893,00)	(468.554.893,00)	(4,40)
						12. Sektor Kependudukan dan Keluarga.	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Uraian	Rencana	Kecelakaan	Selisih	%	No	Uraian	Rencana	Kecelakaan	Selisih	%
1	2	3	4			3	6	7	8		
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	13.	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.	2.493.483.000,00	2.752.075.950,00	(913.87.050,00)	(3,21)
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	2.032.750.000,00	1.868.789.654,00	(183.965.346,00)	(8,96)
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	15	Sektor Agama	465.000.000,00	463.299.500,00	(1.700.500,00)	(0,37)
						16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	318.000.000,00	306.409.900,00	(1.590.100,00)	(1,16)
						17	Sektor Hukum	211.500.000,00	199.949.450,00	(11.550.550,00)	(5,46)
						18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pemerintahan	16.335.807.600,00	15.977.819.665,00	(357.987.935,00)	(2,19)
						19	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Infor masi dan Komunikasi.	1.925.000.000,00	1.854.620.625,00	(70.379.375,00)	(3,64)
						20	Sektor Pertahanan dan Keamanan.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SALL	27.043.964.000,00	28.148.893.912,00	1.104.929.912,00	4,08						
	Penerimaan dari Pemerintah.	656.351.321.796,69	643.937.230.789,30	27.585.908.992,61	4,20		J U M L A H A + B :	656.351.321.796,69	580.233.497.906,33	(76.097.623.890,16)	(11,59)
6	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	27.498.626.507,00	24.233.345.742,00	(3.265.280.765,00)	(11,87)		URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :	27.498.626.507,00	24.248.269.743,00	(3.250.356.764,00)	(11,82)
							a. Urusan Kas dan Perhitungan Neta.	27.498.626.507,00	24.248.269.743,00	(3.250.356.764,00)	(11,82)
							b. Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan.	0,00	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H S E M U A :	683.849.948.303,69	708.170.576.531,30	24.320.628.227,61	3,56		J U M L A H S E M U A :	683.849.948.303,69	604.501.967.649,33	(79.347.980.654,16)	(11,60)

Jumlah Pendapatan : Rp. 708.170.576.531,30
 Jumlah Belanja : Rp. 604.501.967.649,33
 S a l d o : Rp. 103.668.608.881,77

Terdiri dari:
 - Sisa Kas.
 - Sisa Kas Khusus Gaji.
 - Sisa UUJDP Rutin.
 - Sisa UUJDP Pembangunan.

Belum termasuk D)POSITIF :
 96.021.160.504,77
 7.647.448.377,00
 103.668.608.881,77
 80.000.000.000,00

TAHUN ANGGARAN : 2003

LAMPIRAN : 3A
CONTOH : C.II

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERHITUNGAN KAS**

Sisa Kas Tanggal 31 Desember 2002 (Tahun Anggaran—
Yang Lalu).

Rp 145.044.840.316,81

Ditambah :

Penerimaan dari 1 Januari 2003

s/d 31 Desember 2003 (tahun Per
hitungan) :

a. Mengenai Tahun Dinas

Pehitungan Rp 530.146.936.901,38

dikurangi Pengembalian Rp 71.750.227,89

Rp 530.075.186.673,49

b. Penyetoran Kembali Sisa
UUDP Tahun Yang Lalu

Rp 8.817.203.799,00

Rp 683.937.230.789,30

Dikurangi :

Pengeluaran dari 1 Januari

s/d 31 Desember 2003 (tahun Perhi
tungan) :

a. Mengenahi Tahun Dinas Per—

hitungan Rp 587.916.070.284,53

dikurangi Kontra Pos Rp 0,00

Rp 587.916.070.284,53

SISA KAS PADA TANGGAL 31 Desember 2003

Rp 96.021.160.504,77

Keterangan :

Rincian Sisa Kas adalah sebagai berikut :

1. Uang Tunai Rp 0,00

2. Rekening pada BPD. Rp 96.021.160.504,77

Rp 96.021.160.504,77

3. Deposito pada BPD. Rp 80.000.000.000,00

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN DAN SISA KAS**

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN.

a. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini.	Rp	0,00
b. Sisa Perhitungan APBD tahun 2003 (Tahun Dinas Perhitungan)		Rp 103.683.532.882,77
		<u>Rp 103.683.532.882,77</u>

B. SISA KAS PER 31 DESEMBER 2003	Rp	96.021.160.504,77
----------------------------------	----	-------------------

Ditambah karena :

1. Pembukuan – Pembukuan karena penyetoran Sisa UUDP (Tahun Dinas Perhitungan) antara 1 Januari s/d 31 Desember 2003 (bulan berikutnya tahun dinas perhitungan).	Rp	7.647.448.377,00
2. Pembukuan – Pembukuan Administratif tahun 2003 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan pembebanan tahun berikutnya.	Rp	<u>15.039.609,00</u>
	Rp	7.662.487.986,00

Dikurangi dengan :

Pembukuan Administratif yang mengurangi sisa perhitungan tahun 2003 (tahun dinas perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya.	Rp	<u>115.608,00</u>
--	----	-------------------

Rp 7.662.372.378,00

Rp 103.683.532.882,77

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CONTOH : C.III.
DAFTAR HUTANG—HUTANG/KEWAJIBAN YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI PENUTUPAN ANGGARAN
DAN BELUM KEDALUWARSA

Tahun Tagihan	Nama Yang Menagih (Kreditor)	Uraian Hutang/Kewajiban Yang Harus Dibayar	Jumlah RP.	Keterangan Sebab—Sebab Belum Dibayar
1	2	3	4	5
2003	Pemerintah Pusat	Pinjaman Pemerintah Daerah Propinsi DIY. dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringharjo.	650.000.000,00	Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor RDI—225/DDDI/1990 Tanggal 6 Juni 1990. Pinjaman Sebesar : Rp 1.500.000.000,00 Jangka Angsuran 20 Tahun Termasuk Tenggang waktu 5 Tahun. Suku bunga 9 %. setahun. (Angsuran ke 16 dan 17)
			650.000.000,00	